

BAB I

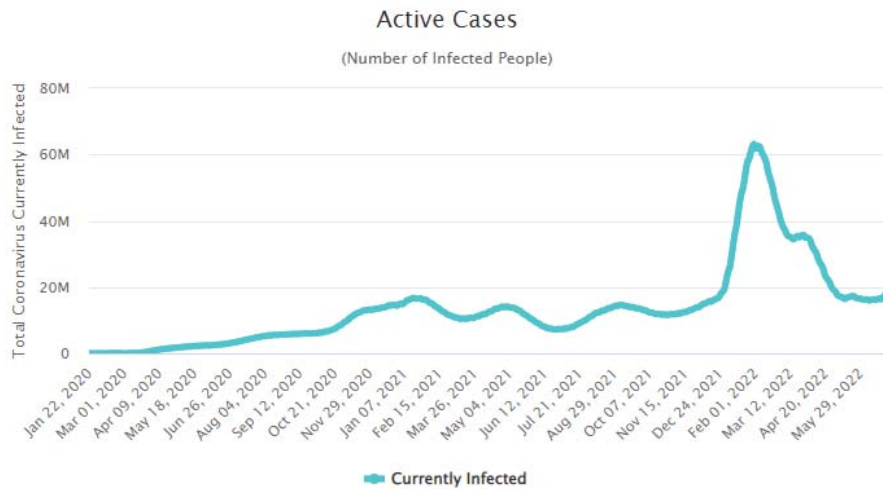
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 19 atau Covid 19 telah menyebabkan perubahan besar dalam segala sisi kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di Negara China yang diklaim sebagai sumber utama penyebaran virus ini, terdapat kurang lebih sekitar 215 negara di dunia telah terparah oleh virus Covid 19. Hal ini disebabkan karena penyebaran virus yang sangat mudah, diantaranya kontak fisik, berbicara, maupun ruangan yang tertutup. Kondisi dunia yang semakin mengkhawatirkan karena adanya virus Covid 19 terus menekan Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* untuk menetapkan *Coronavirus Disease* sebagai Pandemi pada 11 Maret 2020 karena diklaim telah membahayakan kesehatan dunia. Terdapat banyak jiwa yang runtuh akibat terjangkit virus ini bahkan berimplikasi pada kekhawatiran kesehatan jangka panjang bagi penderitanya. Meskipun pandemi telah berlangsung lebih dari dua tahun, tren angka positif masih massif di beberapa negara. Berdasarkan laporan harian dari Worldometer per tanggal 29 Mei 2022 total kasus diseluruh dunia telah mencapai angka 533.031.200. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pandemic merupakan permasalahan publik yang perlu ditanggapi dengan serius. Meski begitu, Worldometers juga menunjukkan data bahwa jumlah kasus aktif masih berada di angka 16.302.786 jiwa dan menjadi PR bagi setiap negara untuk terus memaksimalkan upaya pengentasan krisis kesehatan ini¹

¹ Worldometer. 2022. "Coronavirus Update," *Worldometer*, <https://www.worldometers.info/>.

Gambar 1. Tren Kasus Positif *Coronavirus Disease (Covid 19)* di Dunia



Source: Worldometer - www.worldometers.info 

Sumber : Worldometers, 2022

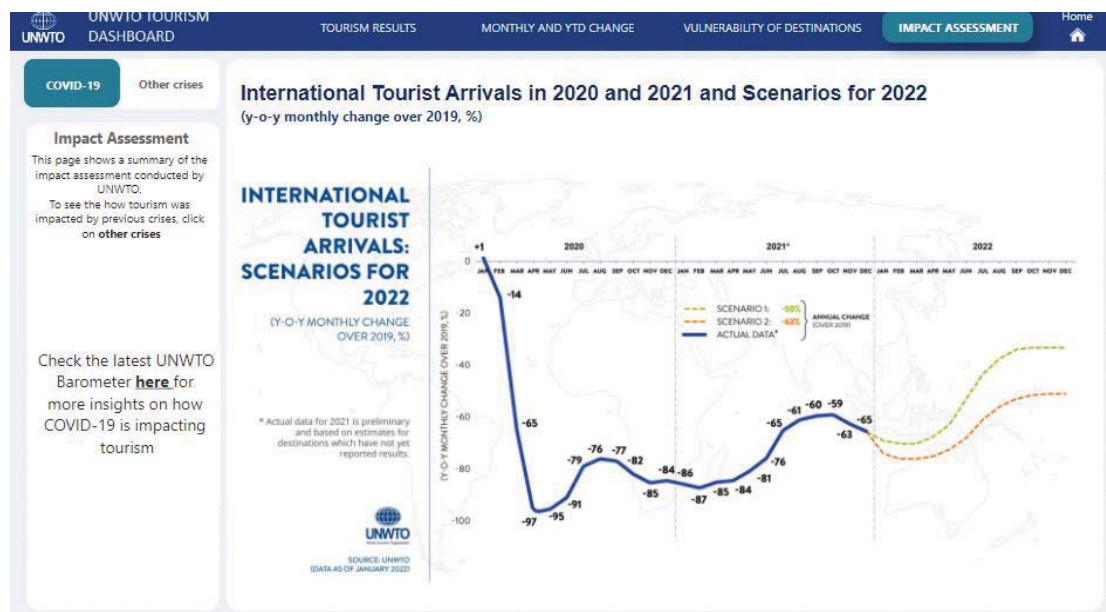
Coronavirus Disease (Covid 19) dianggap menimbulkan efek domino bagi mayoritas negara di dunia. Bukan hanya menimbulkan efek domino, namun krisis multidimensi juga turut hadir seiring dengan peningkatan jumlah kasus yang ada. Berbagai dimensi kehidupan manusia telah terdampak mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pariwisata. Bila dilihat dari segi ekonomi, Bank Dunia atau *World Bank* memaparkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang substansial di seluruh negara di dunia. Data *World Bank* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik terjadi di kisaran 0,5%, Asia Selatan 2,7%, dan Eropa dan Asia Tengah tumbuh dengan kisaran angka 4,7%². Penurunan ekonomi ini juga menyerap puluhan juta jiwa untuk masuk dalam jurang kemiskinan ekstrim. Salah satu penyebab dari penurunan ekonomi ini adalah melemahnya sektor pariwisata di dunia.

Pariwisata merupakan sebuah sektor strategis bagi mayoritas negara di dunia. Hal itu dikarenakan pariwisata telah mampu mendorong peningkatan kemajuan ekonomi dan sosial secara global. Organisasi Pariwisata Dunia atau *The World Tourism Organization (UNWTO)* menyatakan dalam bahwa pariwisata terus mengalami peningkatan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir dan telah diverifikasi sebagai salah satu pendorong sektor ekonomi yang tercepat di dunia. Pariwisata juga telah menduduki posisi sebagai pemain utama dalam

² World Bank. 2020. “*The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World,*” *World Bank Group*. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world>. (diakses 21 Maret 2021)

perdagangan internasional. Bahkan, UNWTO juga mengklaim bahwa pariwisata menjadi faktor penyumbang pendapatan utama bagi negara berkembang³. Hal tersebut dikarenakan sektor pariwisata mampu merangkul banyak sektor untuk keberlangsungan ekonomi seperti UMKM, jasa penerbangan, perhotelan, dll. Namun kehadiran pandemi telah menyebabkan perubahan besar dalam pariwisata di tingkat dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi Pariwisata Dunia atau *The World Tourism Organization* (UNWTO) mencoba untuk menunjukkan data terbaru mengenai perkembangan pariwisata di dunia. Dalam situs resmi UNWTO dipaparkan bahwa kedatangan turis internasional mengalami penurunan tajam sebesar -22% pada kuartal pertama tahun 2020 dan mencapai angka -84% pada akhir tahun 2020⁴. Secara lebih detail, UNWTO menyatakan bahwa kedatangan turis internasional berkurang sebanyak 1 miliar di mana hal itu menyebabkan 1,3 triliun US\$ pendapatan ekspor dari pariwisata internasional dan 100-120 juta jiwa beresiko kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata. Penurunan pariwisata global menurut UNWTO diakibatkan oleh adanya kebijakan di berbagai negara yang menerapkan pembatasan aktivitas perjalanan atau pariwisata pada 96% destinasi wisata di seluruh dunia.

Gambar 2. Perkembangan Pariwisata Dunia Tahun 2020 dan 2021



Sumber : *World Tourism Organization* (UNWTO), 2022

³ World Tourism Organization UNWTO, 2020. "Why Tourism?," *UNWTO.Org* <https://www.unwto.org/why-tourism>. (diakses 23 Maret 2021)

⁴ World Tourism Organization UNWTO, 2021. "UNWTO Tourism Data," <https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard>. (diakses 24 Maret 2021)

(<https://www.unwto.org/tourism-data/international-tourism-and-covid-19>)

Disisi lain, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) juga menyerukan bahwa diperkirakan pariwisata internasional akan menurun tajam sekitar 80% pada tahun 2020. Padahal jika dilihat dari kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dunia, maka pariwisata berkontribusi menyumbang 4,4% dari PDB, menyumbang lapangan kerja sebanyak 21,5% dan ekspor global sebesar 6,5%. Namun hal yang lebih parah dirasakan oleh negara yang menempatkan pariwisata sebagai faktor utama penggerak roda perekonomian negara, diantaranya yakni Negara Prancis (7,4% dari PDB), Negara Meksiko (8,7% dari PDB), dan Spanyol (11,8% dari PDB)⁵. Sehingga dapat dikatakan bahwa pariwisata ini menjadi sektor yang amat penting bagi perekonomian negara, salah satunya bagi Negara Indonesia.

Sebagai salah satu negara kepulauan di dunia, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 Indonesia memiliki kuantitas pulau dengan total 16.056 pulau⁶. Potensi tersebut dapat menjadi potensi strategis bila dikelola dengan baik oleh negara Indonesia. Di Indonesia, pariwisata memiliki regulasi tersendiri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Undang Undang tersebut, dijelaskan bahwa pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan wisata yang berbentuk layanan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, swasta, atau bahkan pengusaha yang didukung oleh fasilitas yang ada⁷. Peran sektor pariwisata sangat penting bagi Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tepatnya pada pasal 4 dijelaskan bahwa kepariwisataan di Indonesia didirikan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengentasan pengangguran, peningkatan citra bangsa, melestarikan alam dan sumber daya, hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain memiliki efek ganda atau *multiplier effect* yang termuat dalam Undang-Undang tersebut, Kementerian Pariwisata RI juga menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang strategis, utamanya dalam memberdayakan dan memperkuat perekonomian Negara Indonesia.

⁵ Santus Kumar Deb and Shohel Md Nafi. 2021. "Impact of COVID-19 Pandemic on Tourism: Recovery Proposal for Future Tourism," *Geojournal of Tourism and Geosites* 33, no. 4 : 1486–1492.

⁶ Badan Pusat Statistik. 2019. "Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2019," *Badan Pusat Statistik*. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1. (diakses 23 Maret 2021)

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kementerian Pariwisata RI mengklaim bahwa pariwisata di masa depan akan menjadi faktor kunci penyumbang devisa terbesar daripada sektor-sektor lain⁸. Faktanya, asumsi bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap devisa juga dibenarkan oleh pihak Bank Indonesia⁹. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2020 menyebutkan bahwa sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terbesar ketiga setelah ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit. Sektor pariwisata di Indonesia kini telah dikelola dengan maksimal dan menjadi *country branding* guna meningkatkan pendapatan devisa Indonesia¹⁰. Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap devisa Negara Indonesia setiap tahunnya menunjukkan hal yang positif. Selain berkontribusi pada pendapatan devisa, pariwisata juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Tabel 1. Capaian Sektor Pariwisata Nasional

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi pada PDB Nasional (%)	4,25	4,13	4,11	5,25	5,5
Devisa (Triliun Rp)	175,71	176,23	198,89	229,50	280

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019 (diolah)

Dalam tabel 1 telah dipaparkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan setiap tahunnya untuk PDB Nasional dan Devisa. Bila dilihat dari tabel 1, sektor pariwisata pada tahun 2015 berkontribusi sebesar 4,25% pada PDB Nasional, namun sempat mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 4,13 persen dan tahun 2017 menurun lagi menjadi 4,11%. Namun, sektor pariwisata kembali memberikan peningkatan kontribusi pada PDB di tahun 2018 yakni 5,25% dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 5,5%. Disisi lain, pariwisata juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap devisa yang mana terjadi peningkatan kontribusi dari tahun 2015-2019. Di tahun 2015 pariwisata menyumbang sebesar 175,71 T pada devisa negara dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 176,23 T. Kemudian di tahun berikutnya yakni tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 198,89 T dan 229,50 T. Namun

⁸ Kemenparekraf, 2020. "Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf," Kemenparekraf.Go.Id. <https://www.kemenparekraf.go.id/post/laporan-akuntabilitas-kinerja-kemenparekraf/baparekraf>.

⁹ Adenisa Aulia Rahma, 2020. "Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia," Jurnal Nasional Pariwisata 12, no. April (2020): 1–8

¹⁰ Sofaria Ayuni et al., 2020. Laporan Perekonomian Indonesia 2020 (Jakarta: Badan Pusat Statistik,). www.bps.go.id

peningkatan signifikan terjadi dalam tahun 2019 yang mana pariwisata ini menyumbang devisa terbesar dari tahun sebelumnya yakni menjadi 280 T. Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa sektor pariwisata ini memang sektor yang krusial dan strategis untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia, utamanya dalam segi ekonomi.

Namun, kedatangan pandemi membuat sektor pariwisata Indonesia menjadi lesu. Salah satu dampak signifikan yang terlihat yakni penurunan angka wisatawan mancanegara. Padahal, Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa jumlah wisatawan mancanegara ini dapat meningkatkan penerimaan devisa negara. Dipaparkan pada data yang termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kementerian Pariwisata 2019 menjelaskan bahwa di tahun 2019 terdapat 16,1 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dan menyumbang penerimaan devisa sebesar 290 Triliun yang mana ini lebih bisa bila dibandingkan 2018 jumlah wisman mencapai 15,81 juta jiwa dengan penerimaan devisa sebesar 229,50 Triliun¹¹. Sehingga pandemi memang memberikan dampak pada penurunan jumlah wisatawan asing ke Indonesia yang secara otomatis menyebabkan kontribusi pariwisata terhadap penerimaan devisa 2020 menjadi menurun. Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa sebelum adanya pandemi, terdapat sekitar 15 miliar dollar AS yang disumbang oleh sektor pariwisata pada devisa negara. Ini menunjukkan bahwa terjadi kemerosotan drastis atas sumbangan pariwisata terhadap devisa yakni sekitar 90%¹². Selanjutnya, penurunan pariwisata juga berdampak pada penurunan pendapatan dalam industri hotel dan restoran di Indonesia. Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) diperkirakan industri hotel dan restoran di Indonesia kehilangan hampir 70 triliun pendapatan karena pemberhentian perjalanan liburan¹³. Selain itu, adanya pandemi juga berakibat pada penurunan jumlah tenaga kerja di Indonesia, utamanya dalam pekerja dalam sektor pariwisata sebesar 409 orang atau tumbuh negatif 0.69 persen seperti yang dipaparkan oleh BPS pada November 2020¹⁴. Hal yang mendasari kejadian tersebut yakni adanya pengurangan jam kerja (*work hour loses*)

¹¹ Kemenparekraf. 2020. *Op.Cit*

¹² Ade Miranti Kurnia. 2020. "Akibat Pandemi, Pendapatan Devisa Sektor Pariwisata Turun Hingga 90 Persen," *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2020/09/25/135500926/akibat-pandemi-pendapatan-devisa-sektor-pariwisata-turun-hingga-90-persen>. (diakses 22 Maret 2022)

¹³ Adrian Wail Akhlah. 2020. "Pandemic Erases \$5.9b of Indonesia's Tourism Revenue as Businesses Seek Help," *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/14/pandemic-erases-5-9b-of-indonesias-tourism-revenue-as-businesses-seek-help.html>. (diakses 23 Maret 2021)

¹⁴ RI Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2021. 'Outlook Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2021' (Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2021)

sehingga menyebabkan 939 ribu orang pekerja pariwisata dari total 49,50 juta tenaga kerja pariwisata harus dirumahkan selama pandemi Covid 19¹⁵.

Tabel 2. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Negara Indonesia (2017-2020)

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisman (juta)	Progress (%)
2016	11,52	10,69
2017	14,04	21,88
2018	15,81	12,58
2019	16,11	1,88
2020	4,1	-74,84

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2020) data diolah

Tabel 2, menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ini mengalami kenaikan setiap tahunnya sebelum adanya pandemi. Di tahun 2016, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 11,52 juta kunjungan. Hal ini merupakan sebuah progress yang positif dari tahun sebelumnya yakni 2015 dengan total 10,41 juta kunjungan. Kemudian peningkatan jumlah pengunjung terjadi sebanyak 21,88 persen yang merupakan peningkatan paling tinggi selama lima tahun terakhir dengan total 14,04 juta kunjungan. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2018 dengan total kunjungan sebanyak 15,81 juta pengunjung dengan persentase peningkatan sebesar 12,58 persen. Data pengunjung menunjukkan signifikansi peningkatan yang cukup baik hingga pada tahun 2019 total kunjungan wisatawan mancanegara mencapai total 16,11 juta pengunjung dan meningkat sebesar 1,88 persen dari tahun 2018. Kemudian lonjakan penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2020 dengan angka penurunan sebesar 74,84 persen dari tahun 2019. Hal ini dapat dilihat bahwa pandemi menyebabkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara dengan drastic dan menyebabkan penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa dan pendapatan nasional negara.

Penurunan pariwisata disisi lain juga merupakan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menyandang peringkat 19 negara yang paling banyak terpapar Covid 19 tingkat dunia mendorong pemerintah untuk menghentikan perjalanan dari luar negeri untuk sementara¹⁶. Dalam hal ini pemerintah mulai memberlakukan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Worldometer. 2022. *Op.Cit.*

Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia pada 2 April 2020¹⁷. Disamping itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yang membatasi pergerakan dan mobilitas manusia untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang sedang mewabah melalui Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian setelah kebijakan PSBB ini diperlunak, pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan melalui Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Nomor 2 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi. Kebijakan ini mencoba untuk memberikan sedikit kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas dan berinteraksi dengan orang lain namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Beberapa kebijakan nasional ini kemudian juga turut mempengaruhi pariwisata di tingkat daerah, salah satunya pariwisata Jawa Timur.

Sebagai daerah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki banyak hal yang bisa menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada. Di tahun 2013, Jawa Timur menjadi provinsi yang paling diminati oleh wisatawan nusantara¹⁸. Hal ini kemudian menyebabkan peningkatan pada kunjungan wisatawan di Jawa Timur. Namun sama seperti seluruh daerah di Indonesia, pariwisata daerah Jawa Timur juga mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19. Selain turun akibat kebijakan nasional yang membatasi masyarakat mancanegara untuk datang ke Indonesia, penurunan angka wisatawan disebabkan pula oleh kebijakan regional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Seperti halnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID 19) di Provinsi Jawa Timur yang juga membatasi kontak sosial secara langsung antar masyarakat. Hal itu kemudian diperkuat dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Coronavirus Disease (COVID 19) di Jawa Timur. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak penyebaran dan penurunan kurva COVID 19 di Jawa Timur dengan meminimalisir kontak antar satu orang dengan orang lain dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Namun disisi lain, Pariwisata Jawa Timur justru terdampak akibat pembatasan aktivitas sosial yang dilakukan

¹⁷ Kendar Umi Kulsum. 2021. "Wisata Aman: Kebijakan Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid-19," *Kompas Pedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/wisata-aman-kebijakan-sektor-pariwisata-di-tengah-pandemi-covid-19>. (diakses 22 Maret 2021)

¹⁸ I Made Asdhiana. 2013. "Jawa Timur Paling Diminati Wisatawan Nusantara". *Kompas.com*. <https://travel.kompas.com/read/2013/09/03/1231466/Jawa.Timur.Paling.Diminati.Wisatawan.Nusantara>. (diakses pada 22 Maret 2021)

oleh masyarakat yang kemudian berakibat pada penurunan angka kunjungan wisatawan ke Jawa Timur.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Jawa Timur (2016-2020)

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisman
2016	220,570
2017	247,166
2018	320,529
2019	243,899
2020	34,521

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 3, dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 220.570 pengunjung yang mana ini kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 247.166 pengunjung. Kemudian di tahun 2018 wisatawan mancanegara meningkat kembali hingga menyentuh angka 320.529 pengunjung. Namun di tahun berikutnya, terjadi penurunan sebesar 23.91% dari tahun lalu yakni 320.529 menjadi hanya 243,899 pengunjung (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021). Namun pandemi menyebabkan pariwisata Jawa Timur semakin merosot lagi yakni terdapat penurunan yang signifikan daripada tahun sebelumnya dengan hanya terdapat 34.521 kunjungan dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi memberikan *multiplier effect*, selain dalam sisi kesehatan juga dalam sisi perekonomian dan kepariwisataan.

Hal yang sama juga dirasakan oleh salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi, yakni Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi dalam bidang pariwisata. Sebagai kabupaten terluas ke 2 di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang memiliki kondisi topografi yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan menjadikan Kabupaten Malang memiliki suhu yang dingin dan sejuk sehingga memberikan nilai tambah tersendiri dalam mengembangkan pariwisata. Pada masa sebelum pandemi, tepatnya pada tahun 2019 pariwisata di Kabupaten Malang mengalami lonjakan jumlah wisatawan yakni sebesar 8.049.829. Jika dilihat dari data yang dipaparkan BPS Kabupaten Malang, perkembangan kunjungan pariwisata di Kabupaten Malang sebelum adanya pandemi terus mengalami progress yang positif setiap tahunnya. Namun kehadiran

pandemi memberikan dampak negatif bagi perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang.

Tabel 4. Tren Kunjungan Wisatawan Kabupaten Malang tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kunjungan (Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Lokal)
2017	6.504.360
2018	7.172.358
2019	8.049.829
2020	1.103.357
2021	1.521.114

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Pariwisata Kabupaten Malang telah mengalami perubahan yang cukup drastis setelah datangnya pandemi Covid 19. Dari tabel 4 yang disajikan oleh BPS Kabupaten Malang dalam laporan tahunan yang berjudul “Kabupaten Malang dalam Angka 2022” diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjungan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal sebelum adanya pandemi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada tahun 2017 jumlah wisatawan mencapai 6.504.360 pengunjung. Kemudian pada 2 tahun selanjutnya yakni pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 7.172.358 dan 8.049.829 atau bisa dikatakan mengalami peningkatan sebesar 23,7 persen dari tahun 2016 ke tahun 2018. Namun di tahun 2020 sebagai tahun awal penetapan pandemi, berbagai kebijakan pemerintah berupaya untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala besar menyebabkan pariwisata Kabupaten Malang mengalami penurunan jumlah wisatawan dari tahun 2019 ke tahun 2020 menjadi 1.103.357 pengunjung atau sebesar 86,2%. Sedangkan di tahun 2021 terdapat sedikit peningkatan dari tahun 2020 yakni menjadi 1.521.114 pengunjung¹⁹. Hal ini membuktikan bahwa pandemi telah memberikan dampak pada pengurangan jumlah wisatawan di Kabupaten Malang.

Penurunan jumlah wisatawan tersebut terjadi karena dipicu oleh beberapa hal. Surat Edaran Bupati Malang Nomor 800/8452/35.07.013/2020 tentang pelaksanaan protocol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru yang memuat aturan mengenai penutupan

¹⁹ BPS Kabupaten Malang. 2022. “Kabupaten Malang Dalam Angka 2022,” Bps Kabupaten Malang. hlm 401.

sementara tempat wisata dengan mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merupakan salah satu faktor penyebab mengapa terjadi penurunan wisatawan di Kabupaten Malang. Penurunan jumlah pengunjung sangat disayangkan, pasalnya perkembangan wisatawan menunjukkan tren positif sebelum hadirnya pandemi. Padahal, pariwisata di Kabupaten Malang menjadi salah satu hal potensial bagi kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Malang itu sendiri. Bahkan di beberapa desa wisata, pariwisata menjadi faktor potensial dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Lebih dari itu, pariwisata juga memberikan banyak peluang pekerjaan bagi para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Malang, yang mana ini menjadi salah satu tujuan dari pengembangan wisata daerah yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kehadiran pandemi telah berdampak pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang, utamanya bagi desa wisata.

Sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah terluas yang didukung dengan kondisi geografis yang potensial, Kabupaten Malang memiliki banyak desa wisata. Pengembangan desa wisata sendiri menjadi salah satu arah kebijakan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dari beberapa desa wisata yang berkembang di Kabupaten Malang, mayoritas desa wisata merasakan dampak dari adanya pandemi Covid 19 utamanya pada penurunan jumlah wisatawan. Salah satu desa wisata yang dianggap sebagai objek wisata unggulan di Kabupaten Malang yang turut terdampak penurunan jumlah wisatawan akibat pandemi yakni Desa Wisata Pujon Kidul. Penurunan jumlah wisatawan memberikan berbagai dampak negatif bagi Desa Pujon Kidul sendiri, baik dalam penurunan pendapatan desa maupun meningkatnya jumlah pengangguran akibat adanya kebijakan penutupan sementara destinasi pariwisata sesuai kebijakan pemerintah pusat. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pelaku wisata di Pujon Kidul, bahwa pandemi memberikan dampak penurunan wisatawan sebanyak 50% yang mana biasanya jumlah pengunjung mampu menyentuh angka 15 ribu pada *weekend*²⁰.

Selain itu, karena penutupan desa wisata yang dilaksanakan kurang lebih 6 bulan mengakibatkan hilangnya omset kurang lebih 7-8 miliar dari kegiatan wisata dan berdampak

²⁰ Tugu Malang Admin. 2020. "Meski Krisis Akibat Pandemi, Desa Wisata Pujon Kidul Tetap Bertahan," *Kumparan.Com*, <https://kumparan.com/tugumalang/meski-krisis-akibat-pandemi-desa-wisata-pujon-kidul-tetap-bertahan-1uMduHaPsDa/full>. (diakses 24 Maret 2021)

pada kurang lebih 700 orang yang terlibat dalam kegiatan desa wisata Pujon Kidul²¹. BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul juga mengakui bahwa kegiatan ekonomi di Pujon Kidul terpuruk akibat adanya pandemi sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola desa wisata. Beberapa bukti diatas menunjukkan bahwa pandemi telah memberikan dampak yang holistic dan menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Wisata Pujon Kidul yang tengah menjadi ikonik bagi pariwisata di Kabupaten Malang.

Tabel 5. Tren Kunjungan Wisatawan di Desa Pujon Kidul

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (pengunjung)
2018	490.994
2019	601.858
2020	418.272
2021	234.162

Sumber : Data Rekapitan BUMDes Sumber Sejahtera (diolah)

Dari tabel 5 diatas, terlihat bahwa perkembangan pariwisata Desa Wisata Pujon Kidul sangat positif. Pada tahun 2018 dan 2019, kedatangan pengunjung mengalami peningkatan dari 490.994 pengunjung menjadi 601.858 pengunjung. Namun hadirnya pandemi telah berdampak pada penurunan angka wisatawan baik di tahun 2020 dan 2021 dengan angka kunjungan mencapai 418.272 dan 234.162. Berdasarkan data yang diperoleh diatas bisa dikatakan bahwa akibat pandemi, kunjungan wisata menurun hampir 50%. Hal tersebut memberikan dampak yang holistik bagi Desa Pujon Kidul, utamanya bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) Pujon Kidul. Padahal, Desa wisata Pujon Kidul merupakan salah satu desa wisata yang menunjukkan perkembangan positif dalam memberikan dampak baik secara sosial dan ekonomi pada desa maupun masyarakat setempat. Dengan pengelolaan yang baik, desa wisata Pujon Kidul telah mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Bukan sekedar memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa, namun juga mampu memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat sehingga mengurangi jumlah mobilisasi tenaga kerja karena diserap oleh pariwisata desa itu sendiri.

²¹ Irfan Anshori. 2021. “Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Di Desa: Sebuah Cerita Dari Pujon Kidul,” *Times Indonesia*. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/354842/kebangkitan-ekonomi-pasca-pandemi-di-desa-sebuah-cerita-dari-pujon-kidul>. (diakses 8 April 2022)

Tabel 6. Dampak Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Pujon Kidul

Tahun	Sumbangan untuk PADes
2017	Rp 162,500,000
2018	Rp 712,000,000
2019	Rp1,756,000,000
2020	Rp 1,474,524,046
2021	Rp 833,761,986

Sumber : Data BUMDes Sumber Sejahtera (data diolah)

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa pariwisata memberikan dampak yang signifikan bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) Pujon Kidul. Diketahui bahwa sebelum adanya pandemi yakni pada tahun 2017, 2018, dan 2019 kontribusi pariwisata untuk PADes Pujon Kidul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ditahun 2017 pariwisata berhasil menyumbang PADes sebesar 162.500.000 rupiah, kemudian meningkat di tahun 2018 dengan total sumbangan mencapai angka 712.000.000 rupiah, dan selanjutnya meningkat kembali di tahun 2019 dengan jumlah 1.756.000.000 rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor penting bagi pendapatan Desa Pujon Kidul yang mana nantinya akan berdampak pada pembangunan Desa Pujon Kidul sendiri. Kemudian penurunan jumlah sumbangan pariwisata pada PADes Pujon Kidul mulai menurun di tahun 2020 dan tahun 2021, yang mana pada tahun 2020 sumbangan pariwisata menurun ke angka 1.474.524.046 rupiah dan di tahun 2021 menjadi 833.761.986 rupiah. Sehingga memang bisa dikatakan bahwa pandemi memberikan dampak pada penurunan PADes Pujon Kidul. Padahal, Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul mengatakan bahwa kontribusi terbesar untuk PADes Pujon Kidul adalah dari sektor pariwisata²². Sehingga hal ini yang menjadi alasan mengapa Desa Pujon Kidul harus beradaptasi dengan adanya pandemi untuk pengelolaan pariwisata agar sektor pariwisata tetap bisa menjadi sektor unggulan dalam mendorong percepatan pembangunan desa.

Selain berdampak pada PADes Pujon Kidul, pariwisata desa wisata Pujon Kidul juga telah mampu menurunkan angka kemiskinan dengan pengelolaan dana desa dan pariwisata yang dinilai sangat baik. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Pujon Kidul Malang, Udi

²² Wawancara dengan Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul pada 19 April 2022

Hartoko bahwa dana desa telah dikelola sebaik mungkin guna menanggulangi kebutuhan masyarakat serta memaksimalkan potensi daerah yang salah satunya diwujudkan dengan dibentuknya BUMDes yang menjadi pengelola unit wisata desa dan Café Sawah. Kepala Desa Pujon Kidul juga menambahkan bahwa pengelolaan pariwisata yang baik juga turut memberikan kesempatan bagi hadirnya UMKM baru sebanyak 320 usaha dan mempekerjakan pekerja dari rumah tangga miskin sebanyak 167 pekerja sehingga mampu mengentaskan kemiskinan sebesar 33,5 persen dari tahun 2016 hingga tahun 2018²³. Berkat kerja keras dari seluruh stakeholder di desa wisata Pujon Kidul pun berhasil membuat Desa Pujon Kidul memperoleh berbagai penghargaan, yakni sebagai Desa Wisata Agro Terbaik tahun 2017 dari Kementerian Desa, mendapatkan penghargaan pada ajang Sustainable Tourism Award (ISTA) dalam kategori Pemenang Hijau dari Kementerian Pariwisata pada 2018, dan memperoleh penghargaan sebagai desa mandiri inspiratif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dalam acara Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021²⁴. Keberhasilan dari pengelolaan Desa Pujon Kidul menjadi desa wisata yang sukses tidak hanya buah dari kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, namun juga BUMDes, organisasi Karang Taruna, masyarakat dan stakeholder lain yang berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata. Hal tersebut yang juga kemudian mendorong Desa Wisata Pujon Kidul tetap bertahan meskipun di masa pandemi. Meskipun di masa pandemi terjadi penurunan wisatawan sekitar 50% namun Desa Wisata Pujon Kidul tetap buka dengan jumlah pengunjung sekitar 500 hingga 600 orang di hari kerja dan diakhir pekan pengunjung masih mencapai 4000 hingga 5000 orang²⁵. Hal tersebut menggambarkan bahwa pandemi tidak memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan bagi perkembangan pariwisata di Desa Wisata Pujon Kidul karena pariwisata tetap menjadi sektor unggulan yang menjadi kontributor terbesar bagi PADes Pujon Kidul.

Untuk dapat tetap menjadi sektor yang potensial dalam memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat, pariwisata harus melakukan berbagai upaya untuk dapat bertahan walaupun di masa krisis. Salah satunya dengan tata kelola adaptif pariwisata di masa pandemi. Keadaptifan adalah sebuah bentuk ketahanan dalam kondisi darurat, sehingga dalam konteks Covid 19 diperlukan kemampuan adaptif yang baik utamanya dalam tujuan untuk *recovery*

²³ Kementerian Keuangan RI. 2019. "Dana Desa Gerakkan Desa Wisata Pujon Kidul Berpendapatan Di Atas Rp1 Miliar," Kemenkeu.go.id.

²⁴ Irfan Anshori. 2021. "Top, Dua Desa Wisata Di Kabupaten Malang Raih Penghargaan ADWI 2021," Times Indonesia.

²⁵ *Ibid.*

atau pemulihan stabilitas ekonomi negara. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memiliki kemampuan tata kelola yang adaptif guna keberlangsungan pariwisata mengingat bahwa peran pariwisata sangat dominan untuk pembangunan daerah, utamanya kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan menjadi adaptif untuk menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan lingkungan²⁶. Janssen dan Voort juga menekankan bahwa adaptasi pemerintah merupakan hal yang sangat krusial ketika menghadapi ketidakstabilan dan krisis akibat perubahan besar pada lingkungan masyarakat²⁷. Penekanan peran pemerintah dalam ketahanan pariwisata juga dituturkan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bahwa koordinasi, respon, dan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dari pemerintah adalah hal utama yang perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata suatu negara²⁸. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) juga mengutarakan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam *recovery* pariwisata yakni mengembalikan kepercayaan wisatawan; mendorong bisnis pariwisata untuk beradaptasi dan bertahan; mengembangkan langkah responsif untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakseimbangan yang terjadi; membangun pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan; dan, memperkuat kerjasama di dalam pengelolaan pariwisata. Sehingga dari penekanan tersebut dapat dilihat bahwa tata kelola adaptif pemerintah sangat penting dilakukan untuk mampu mengembalikan pariwisata menjadi sektor yang unggul dan lebih tangguh.

Berdasarkan kajian literatur yang telah peneliti lakukan, maka terdapat 5 penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marijin Janssen dan Haiko van der Voort yang berjudul “*Agile and Adaptive governance in Crisis Response: Lessons from the Covid 19 Pandemic*” yang meneliti tentang bagaimana pemerintah merespon krisis dan dampak yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid 19

²⁶ Gagan Deep Sharma, Asha Thomas, and Justin Paul. 2020. “Reviving Tourism Industry Post-COVID-19: A Resilience-Based Framework,” *Tourism Management Perspectives* 37: 100786, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100786>

²⁷ Marijin Janssen and Haiko van der Voort. 2016. “*Adaptive governance: Towards a Stable, Accountable and Responsive Government*,” *Government Information Quarterly* 33, no. 1 : 1–5, <http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.003>.

²⁸ OECD. 2020. “Rebuilding Tourism for the Future: COVID-19 Policy Responses and Recovery,” *Oecd*, no. October (2020): 1–100, <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/rebuilding-tourism-for-the-future-covid-19-policy-responses-and-recovery-bced9859/>.

dengan kelincahan dan juga adaptivitas dengan studi kasus pada Negara Belanda²⁹. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode studi literatur. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Negara Belanda memiliki kelincahan dalam merespon pandemi, dibuktikan dengan pemberlakuan himbauan untuk menahan diri untuk keluar dari wilayah pada Provinsi Brabant Utara yang merupakan tempat pertama penyebaran virus corona pada 6 Maret sejak terkonfirmasi kematian akibat Covid 19 di Belanda. Di sisi adaptivitas, pemerintah tidak memiliki lembaga yang siap beradaptasi. Kesamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama mencari informasi mengenai bagaimana tata kelola adaptif pemerintah untuk merespon krisis akibat pandemi Covid 19. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan studi kasus di luar Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus di dalam Negara Indonesia; dan bidang yang diambil dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan detail mengarah pada bidang apa, sedangkan penelitian ini berfokus pada bidang pariwisata.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Willy Tri Hardianto, Emelia, dan Roro Merry Chornelia W dengan judul “Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa Covid 19 : Studi di Wisata Taman Dolan, Desa Pandanrejo, Kota Batu”³⁰. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses dalam pengelolaan pariwisata di Kota Batu selama pandemi Covid 19. Diketahui bahwa teori yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teori strategi organisasi. Sehingga penelitian tersebut berfokus pada strategi yang dilakukan Desa Wisata Pandanrejo untuk mengelola pariwisata di masa pandemi Covid 19. Sehingga untuk menutupi kekurangan literatur, maka penelitian ini juga mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai tata kelola desa wisata yang adaptif dengan menggunakan teori *adaptif governance*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Intan Margareta Triaryanti yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang”³¹. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tata kelola kolaboratif dalam mengelola BUMDes di Desa Wisata Pujon Kidul dikarenakan kesuksesan pengelolaan Bumdes

²⁹ Marijn Janssen and Haiko van der Voort. 2020. “Agile and *Adaptive governance* in Crisis Response: Lessons from the COVID-19 Pandemic,” *International Journal of Information Management* 55: 102180, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>.

³⁰ Willy Tri Hardianto, Emelia Emelia, and Roro Merry Chornelia W. 2021. “Strategi Pengelolaan Pariwisata Di Masa Covid-19 (Studi Di Wisata Taman Dolan, Desa Pandanrejo, Kota Batu),” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 5, no. 1: 38.

³¹ Intan Margareta Triaryanti. 2019. “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang”. Skripsi. (Universitas Airlangga, 2019)

sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hasil dari penelitian ini yakni banyak sekali stakeholder yang terlibat diantaranya BUMDes Sumber Sejahtera, Pemerintah Desa Pujon Kidul, Pokdarwis, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, dan Bank BNI 46. Untuk menutupi kekurangan literature maka penelitian ini mencoba untuk menggunakan teori tata kelola adaptif atau *adaptive governance* untuk melihat bagaimana kesuksesan pengelolaan Desa Wisata utamanya di masa pandemi Covid 19.

Keempat, yakni penelitian tugas akhir yang berjudul “Sinergitas Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang” yang diteliti oleh Ika Rizkiyah Khomzi pada tahun 2019³². Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana sinergitas dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul dan juga menjelaskan bagaimana dampak sinergitas stakeholder terhadap sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hasil dari penelitian tersebut yakni kepercayaan yang terjadi ada yang kuat dan ada yang lemah, namun dari sisi komunikasi terlihat sangat efektif dan terlihat adanya respon yang cepat dari para stakeholder. Sehingga penelitian diatas lebih berfokus pada bagaimana sinergitas yang terjadi dari para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Pujon Kidul sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana tata kelola adaptif yang dilakukan dalam pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul dengan menggunakan beberapa indikator yakni institusi polisentris dan multilevel, partisipasi dan kolaborasi, pengorganisasian diri dan jaringan mandiri, serta inovasi dan pembelajaran sosial.

Kelima, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Suriaatmaja Suwanda, Shania Aprilia Sari, dan Herry Rachmat Widjaja dengan judul “Strategi Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata RI dalam Menghadapi Krisis Kepariwisataaan Akibat Tsunami Selat Sunda³³. Dalam penelitian tersebut mencoba untuk menganalisis bagaimana manajemen krisis akibat Tsunami Selat Sunda dengan berfokus pada Departemen Hubungan Masyarakat Kementerian Pariwisata pada akhir 2018. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni pada penelitian ini lebih menekankan pada bentuk pengelolaan adaptif yang dilakukan desa wisata dalam menangani krisis pariwisata akibat wabah pandemi Covid 19.

³² Ika Rizkiyah Khomzi, Setiyo Yuli Handono, and Anis Trianawati. 2020. “Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang,” *Agribisnis* 13, no. 2 hlm: 25–35

³³ Bayu Suriaatmaja Suwanda, Shania Aprilia Sari, and Herry Rachmat Widjaja. 2020. “Strategi Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata Ri Dalam Menghadapi Krisis Kepariwisataaan Akibat Tsunami Selat Sunda,” *Indonesian Journal of Science and Education* 1, no. hlm: 1–17, <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/ijose/article/view/413/381..>

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dikerucutkan bahwa permasalahan empiris (*empirical problem*) yang terjadi yakni adanya kemampuan Desa Wisata Pujon Kidul untuk bertahan dan beradaptasi dengan bencana wabah Covid 19 meskipun mayoritas jumlah wisatawan di Kabupaten Malang mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya, gap penelitian (*research gap*) dari penelitian sebelumnya belum ditemukan adanya penelitian mengenai tata kelola adaptif dalam pengelolaan desa wisata di masa pandemi Covid 19. Dua hal tersebut merupakan sebuah dasar mengapa peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pengelola desa wisata dapat mendorong terciptanya adaptivitas sebagai kemampuan untuk bertahan ditengah adanya pandemi Covid 19.

I.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini yakni bagaimana adaptifitas Desa Wisata Pujon Kidul dalam pengelolaan pariwisata dimasa pandemi Covid 19 dalam perspektif *adaptive governance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yakni mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana Desa Wisata Pujon Kidul dalam pengelolaan pariwisata di masa pandemi Covid 19 dalam perspektif *adaptive governance*.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Akademis

Dengan memperhatikan penelitian terdahulu, *research gap* yang ditemukan yakni belum terdapat penelitian yang membahas mengenai tata kelola adaptif (*adaptive governance*) dalam pengelolaan pariwisata di desa wisata masa pandemi Covid 19. Beberapa penelitian mengenai *adaptive governance* lebih menekankan pada manajemen bencana untuk penanggulangan bencana alam dan terbatasnya kajian mengenai *adaptive governance* dalam bidang pariwisata, utamanya di Indonesia. Selain itu, masih minimnya kajian ilmiah mengenai tata kelola adaptif (*adaptive governance*) di Indonesia dalam konteks penanganan lingkungan akibat pandemi Covid 19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam

tata kelola adaptif dilakukan dengan menekankan partisipasi dan kolaborasi dan keberhasilan adaptifitas tidak selalu membutuhkan peran dari LSM. Dengan begitu maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian terkait tata kelola adaptif dalam bidang pariwisata yang berkaitan dengan langkah atau kebijakan yang diambil oleh Desa Wisata Pujon Kidul dalam konteks pandemi Covid 19 serta bisa menjadi bahan pengembangan ilmu administrasi publik serta mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan tata kelola adaptif dalam bidang pariwisata dalam merespon krisis dalam perspektif tata kelola adaptif (*adaptive governance*).

I.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pengelola Desa Wisata Pujon Kidul termasuk Pemerintah Desa Pujon Kidul, BUMDes Pujon Kidul, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja guna menciptakan iklim pemerintahan yang responsif dan adaptif dalam masa krisis Covid 19 di Desa Wisata Pujon Kidul. Selanjutnya keberhasilan pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Pujon Kidul di masa pandemi Covid 19 dapat menjadi bahan pelajaran desa wisata lain untuk menghadapi dan mengelola krisis yang tidak dapat diprediksi.

I.5 Kerangka Teoritik

I.5.1 Governance

Governance merupakan paradigma yang menekankan pentingnya interaksi sosial antara pemerintah dan aktor non pemerintah yang diarahkan kedalam pengambilan suatu keputusan secara kolektif³⁴. Kehadiran istilah *governance* dipicu oleh kompleksitas permasalahan masyarakat dan kurangnya kemampuan pemerintah untuk mengelola kompleksitas permasalahan yang ada, utamanya mengenai responsivitas³⁵. Kompleksitas permasalahan publik menekan pemerintah untuk melakukan pembaharuan dengan pergeseran peran pemerintah dari hierarki menjadi heterarki yang mencoba untuk membangun hubungan horizontal dalam berbagai aktor, termasuk publik dan swasta.

³⁴ Abdul Rahim. 2019. "Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective," Journal of Public Administration and Governance 9, no. 3: hlm 133

³⁵ Steve Hatfield-Dodds et al.,. 2007. "Adaptive governance: An Introduction, and Implications for Public Policy, No 10440," 51st Annual conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society 2006, no. February . hlm: 1–13, <http://econpapers.repec.org/RePEc:ags:aare07:10440>.

Sejalan dengan definisi sebelumnya, bahwa paradigma *governance* ini mengakui bahwa organisasi pemerintahan tidak bisa hanya berpaku dengan rantai hierarki yang sederhana. Ketergantungan pemerintah menyiratkan bahwa organisasi publik perlu berkomitmen untuk melakukan tindakan kolektif dan bergantung pada organisasi lain dengan saling bertukar sumber daya dan tanggapan serta menegosiasikan tujuan bersama³⁶. Tata kelola juga menyangkut bagaimana cara kita untuk membangun pengambilan keputusan yang kolektif. *Governance* sebagai jawaban atas perubahan lingkungan eksternal telah menggambarkan bahwa organisasi menemukan banyak masalah utamanya dalam menanggapi tuntutan masyarakat, perubahan dalam lingkup nasional dan internasional, dan kompleksitas masalah sosial masyarakat di mana tata kelola berperan penting dalam menangkap respon terhadap perubahan yang terjadi³⁷.

Selanjutnya dalam merespon perubahan guna menghasilkan tata kelola yang baik maka diperlukan adaptivitas pemerintah terhadap perubahan yang tidak dapat diprediksi. Bahkan tata kelola untuk dapat mencapai stabilitas memerlukan bentuk organisasi yang fleksibel dan tidak kaku guna mempermudah penyesuaian dengan dinamika lingkungan. *Governance* memiliki peran penting untuk menciptakan organisasi publik yang responsif dan tanggap akan dampak dari perubahan lingkungan, utamanya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. *Governance* juga harus memastikan bahwa negara adalah penting perannya dalam menyediakan layanan untuk masyarakat dan bertindak untuk melayani dan bertanggung jawab atas sumber daya publik³⁸. Sehingga poin pentingnya yakni *Governance* merupakan bentuk paradigma di mana dalam menyelesaikan masalah publik negara didorong untuk bersikap aktif dan tanggap untuk mengatasi kompleksitas permasalahan sosial dengan melakukan berbagai upaya interaksi dengan aktor non pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

1.5.2 Adaptive Governance

Tata kelola adaptif atau *adaptif governance* merupakan salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam studi mengenai penanganan perubahan lingkungan sosial-ekologi. Tata kelola adaptif awal mulanya dikonseptualisasikan pada bidang tata kelola lingkungan sekitar tahun 1990-an. Tata kelola adaptif berakar dari tiga teori utama yakni teori ekologi manajemen adaptif oleh Gunderson dan Light (2007), teori pengelolaan bersama oleh Cundill

³⁶ Stephen Rainey. 2014. "Governance Theory and Practice," Human Rights and Ethics (2014): 100–116.

³⁷ David Hulme, Mark Turner, and Willy McCourt. 2015. *Governance, Management and Development : Making the State Work* (London: Palgrave). hlm 26-27

³⁸ Carl Folke et al., 2005 "Adaptive governance of Social-Ecological Systems," Annual Review of Environment and Resources 30, no. May 2014: hlm. 443.

dan Fabricius (2009), dan teori sosial kolaborasi oleh Djalante, Holley dan Thomalla³⁹. Tata kelola adaptif merupakan konsep yang muncul dari pengelolaan lingkungan dan studi mengenai ketahanan yang dianggap sebagai cara untuk mencapai sebuah sistem tata kelola yang bersifat fleksibel, inklusif, dan multilevel guna menangani permasalahan sosial ekologis, perubahan mendadak, dan ketidakpastian secara efektif dan kompleks⁴⁰. Tata kelola adaptif menyadari bahwa analisis tata kelola sumber daya alam sangat diperlukan mengingat bahwa terdapat hubungan saling ketergantungan antara sosial dan ekologi sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan⁴¹.

Tata kelola adaptif oleh Shin (2006) didefinisikan sebagai suatu keharusan bagi sebuah sistem tata kelola untuk memiliki kemampuan dalam merubah praktik yang efisien dan efektif dalam menanggapi perubahan dan ketidakpastian lingkungan dengan mengikuti wawasan dan pengalaman⁴². Tata kelola adaptif mengacu pada langkah atau cara dari tatanan kelembagaan yang menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat atas perubahan lingkungan⁴³. Tata kelola adaptif harus mampu merubah praktik dalam menanggapi perubahan dan ketidakpastian akan lingkungan yang dinamis, karena perubahan lingkungan yang kompleks dan dahsyat membutuhkan tata kelola yang lebih luas. Selanjutnya, Folke berpendapat bahwa diperlukan sebuah manajemen yang mampu belajar dan beradaptasi terhadap perubahan untuk menanggulangi perubahan lingkungan yang kompleks⁴⁴. Sehingga diketahui bahwa tata kelola adaptif membutuhkan sebuah kemampuan manajemen yang efektif dan efisien yang mampu menanggapi ketidakpastian lingkungan yang terjadi secara cepat dan kompleks.

Menanggapi lingkungan yang kompleks tidak cukup hanya dengan tindakan tunggal, diperlukan tata kelola adaptif di mana menanggapi lingkungan yang tidak pasti dibutuhkan banyak aktor yang terlibat⁴⁵. Sejalan dengan pendapat Walch bahwa perubahan lingkungan akan menjadi tantangan tersendiri yang mana tidak bisa diatasi oleh agensi secara mandiri dan

³⁹ Simone Ruane. 2020. "Applying the Principles of *Adaptive governance* to Bushfire Management: A Case Study from the South West of Australia," *Journal of Environmental Planning and Management* 63, no. 7, <https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1648243>. hlm 5

⁴⁰ Martin Brown Munene, Åsa Gerger Swartling, and Frank Thomalla. 2018. "Adaptive governance as a Catalyst for Transforming the Relationship between Development and Disaster Risk through the Sendai Framework?," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 28, no. January (2018). <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.01.021>. hlm 2

⁴¹ Keith Carlisle and Rebecca L. Gruby. 2017. "Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons," *Policy Studies Journal* 47, no. 4. hlm 3

⁴² Colin Walch. 2019. "Adaptive governance in the Developing World: Disaster Risk Reduction in the State of Odisha, India," *Climate and Development* 11, no. 3. hlm: 238–252

⁴³ Hatfield-Dodds et al., 2007. *Op.Cit.* hlm 3

⁴⁴ Folke et al., 2005. *Op.Cit.* hlm 445.

⁴⁵ Janssen and van der Voort. 2016. *Op. Cit.* hlm 2.

mebutuhkan tata kelola yang lebih luas untuk menanggapi ketidakpastian. Keterlibatan banyak aktor diperlukan dengan landasan bahwa suatu penyelesaian permasalahan yang terjadi secara tiba-tiba tidak bisa diatasi secara mandiri oleh satu organisasi. Chaffin et Al memiliki definisi tata kelola adaptif yang berkaitan dengan keterlibatan banyak aktor dalam tata kelola adaptif, bahwa tata kelola adaptif dimaknai sebagai interaksi antar aktor, jaringan, organisasi, dan institusi yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai stabilitas kondisi dalam sistem sosial ekologis⁴⁶. Tata kelola adaptif atau tanggapan adaptif penting dilakukan pemerintah dengan merangkul banyak pihak untuk menanggapi dampak sosial dan spasial sebagai akibat dari perubahan global dan iklim untuk menciptakan ketahanan lingkungan⁴⁷. Seperti yang dijelaskan oleh Folke dkk bahwa dalam menanggapi perubahan ekosistem penting untuk mengembangkan praktik pengelolaan terpadu yang mampu memberikan tanggapan umpan balik pada ekosistem dengan terus belajar, menghadapi ketidakpastian dan kejutan dengan membangun kapasitas adaptif, dan juga membangun jaringan sosial melalui sistem tata kelola bertingkat. Tata kelola adaptif menegaskan bahwa organisasi publik membutuhkan mekanisme tata kelola yang memastikan bahwa layanan publik dasar disediakan oleh negara dan negara bertindak sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas pengelola sumber daya publik. Sehingga menanggapi permasalahan publik atas dinamika lingkungan yang berubah dengan ketidakpastian dan kejutan dengan melibatkan banyak aktor atau pemangku kepentingan adalah poin penting dalam tata kelola adaptif. Seperti yang dijelaskan oleh Hulbert bahwa *adaptive governance* merupakan suatu bentuk tata kelola yang manajemen masalah melalui upaya kolaboratif, fleksibel, dan berbasis pembelajaran dari aktor dengan skala yang berbeda-beda guna menciptakan suatu ketahanan.

Tata kelola adaptif juga menekankan pada kapasitas individu dalam melakukan pembelajaran. Folke, Simone Ruane, dan Djalante et al. yang menyebutkan bahwa prinsip dari *adaptive governance* adalah pembelajaran sosial dan menganggap bahwa pembelajaran yang efektif atas pengalaman merupakan hal penting bagi sebuah organisasi guna membangun pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan tata kelola adaptif yang baik⁴⁸. Pembelajaran dalam tata kelola adaptif dianggap sebagai hal yang krusial untuk mengelola sistem sosial-ekologi yang kompleks karena nantinya akan menciptakan kesiapan bagi manajer organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dan kejutan dari lingkungan. Lebih lanjut, Folke

⁴⁶ Munene, Swartling, and Thomalla, 2016. *Op.Cit* . hlm 1

⁴⁷ Joseph M. Cheer and Alan Lew. 2017. "Tourism, Resilience and Sustainability : Adapting to Social, Political and Economic Change," Routledge Advances in Tourism Ser hlm : 309

⁴⁸ Folke et al., 2005. *Op.Cit* . Hlm 447

menjelaskan bahwa tata kelola adaptif menunjukkan responsivitas sosial pemerintah akan dinamika ekosistem sosial yang khususnya dalam hal pembelajaran dari tingkat individu dengan manajemen praktek dan jaringan sosial di organisasi⁴⁹. Pembelajaran sebagai inti dari tata kelola adaptif juga ditekankan oleh Gunderson bahwa tidak ada cara terbaik untuk menghadapi tingkat kompleksitas, ketidakpastian, dan banyak pemangku kepentingan tanpa belajar dari pengalaman diri sendiri⁵⁰.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa tata kelola adaptif atau adaptif *governance* merupakan salah satu pendekatan yang berkaitan dengan responsivitas pemerintah untuk menanggapi perubahan dan ketidakpastian lingkungan sosial dan ekologi dengan menekankan pada keterlibatan banyak aktor pemangku kepentingan sekaligus memaksimalkan pembelajaran sosial dan inovasi guna mengelola perubahan dengan efektif dan kompleks.

I.5.2.1 Prinsip *Adaptive Governance*

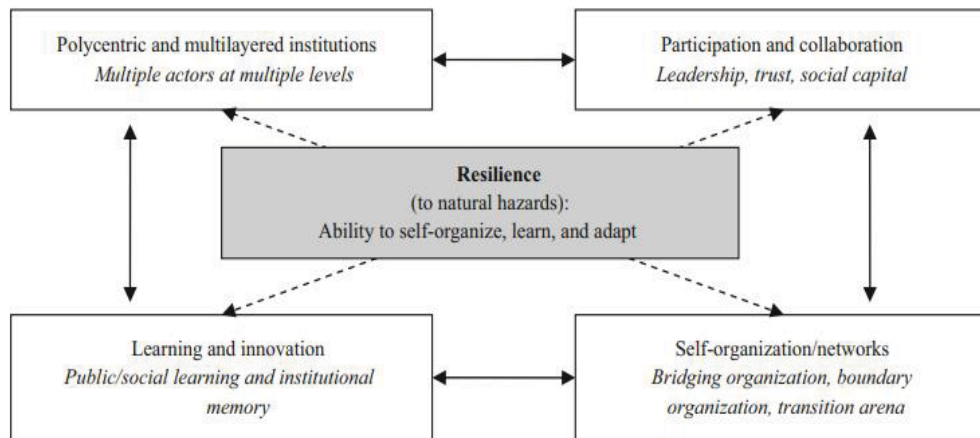
Terdapat beberapa prinsip tata kelola adaptif yang termuat dalam beberapa literature, diantaranya 4 prinsip yang diutarakan oleh Simone Ruane yakni institusi polisentris, kolaborasi, pembelajaran sosial, dan reflektivitas; 3 prinsip tata kelola adaptif dalam literature Yasmin et. al yakni tata kelola multilevel dan polisentris, pendekatan partisipatif dan jaringan, dan organisasi yang menjembatani dan kepemimpinan; dan, 4 prinsip tata kelola adaptif dalam literatur Djalante yang terdiri dari institusi polisentris dan multilevel, partisipasi dan kolaborasi, pengorganisasian diri dan jaringan, dan pembelajaran sosial dan inovasi.

Didalam penelitian ini, prinsip tata kelola yang digunakan sebagai alat untuk menggambarkan tata kelola adaptif dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Pujon Kidul adalah teori yang dikemukakan oleh Djalante, Holley, & Thomalla. Terdapat beberapa karakteristik yang dikemukakan dalam tata kelola adaptif menurut Djalante et. al yakni *polycentric and multilayered institutions* (institusi polisentris dan berlapis-lapis), *participation and collaboration* (partisipasi dan kolaborasi), *self-organization and networks* (pengorganisasian diri dan jaringan), *and learning and innovation* (pembelajaran dan inovasi)⁵¹ dengan penjelasan sebagai berikut :

⁴⁹ *Ibid.* hlm 444.

⁵⁰ Janssen and van der Voort. 2016. *Op.Cit.* Hlm 3.

⁵¹ Riyanti Djalante, Cameron Holley, and Frank Thomalla. 2011. “*Adaptive governance* and Managing Resilience to Natural Hazards,” *International Journal of Disaster Risk Science* 2, no. 4.



Gambar 3. Keterkaitan antara karakteristik utama dari tata kelola adaptif

Sumber : (Djalante et al., 2011)

Berdasarkan gambar 3 diatas, dapat dijelaskan bahwa beberapa karakteristik diatas merupakan sebuah kesatuan dalam membentuk ketahanan dalam sebuah tata kelola. Terdapat dua panah pada gambar diatas di mana panah garis padat menggambarkan hubungan utama antara karakter dan garis putus-putus menunjukkan adanya hubungan yang tidak langsung. Dapat dilihat bahwa institusi polisentris dan multilayer merupakan sebuah kunci menuju tata kelola adaptif yang mana jika model institusi polisentris dan berlapis jika digabungkan bersamaan dengan kepemimpinan, kepercayaan, dan modal sosial maka akan mendorong terbentuknya partisipasi dan kolaborasi. Selanjutnya, pengorganisasian diri dapat dilaksanakan baik secara formal maupun informal yang pernah ada serta dipraktekkan melalui berbagai bentuk jaringan. Dengan adanya jaringan maka pembelajaran dan inovasi akan tercipta dan akan mendorong sebuah kemampuan untuk bertahan. Sedangkan apabila ditinjau dari gambaran garis putus-putus maka secara tidak langsung institusi polisentris dan multilayer akan meningkatkan efektivitas pengorganisasian diri dan pembentukan jaringan kerja dan sebaliknya. Sedangkan partisipasi dan kolaborasi juga secara tidak langsung akan mendorong proses pembelajaran dan inovasi menjadi lebih cepat. Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antar karakteristik dalam teori *adaptive governance* yang mana akan mendorong terciptanya sebuah ketahanan dalam tata kelola. Dalam konteks penelitian ini, ketahanan dikaitkan dengan kemampuan adaptifitas dari Desa Wisata Pujon Kidul dalam mengelola pariwisata diantara adanya perubahan lingkungan social ekologis akibat adanya pandemic Covid 19.

1.5.2.1.1 *Polycentric and Multilayered Institutions* (Institusi Polisentris dan Berlapis-lapis)

Konsep polisentris diperkenalkan oleh Vincent dan Elinor Ostrom. Institusi polisentris digambarkan sebagai bentuk pemerintahan yang kompleks di mana terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang masing-masing memiliki otonomi tertentu⁵². Berdasarkan hasil penelitian Djalante, Holley, & Thomalla (2011) dalam bahwa polisentris memahami banyak pusat dalam pengambilan keputusan dan secara formal tindakan tersebut tidak menunjukkan ketergantungan satu sama lain. Institusi polisentris juga merupakan sebuah karakteristik yang menunjukkan adanya berbagai macam otoritas pemerintahan dalam skala tata kelola yang berbeda⁵³. Seperti halnya terdapat berbagai aktor non-negara yang dapat melakukan beberapa otoritas yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti fungsi administrasi, manajerial, fungsi pengaturan, dll. Institusi multi level dan berlapis-lapis memberikan peluang bagi institusi lokal untuk mengintegrasikan kebijakan guna beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekologis. Selain itu, polisentrisisme juga mendorong interaksi antar kelembagaan sehingga menciptakan keragaman tanggapan dan mendorong kolaborasi⁵⁴. Institusi polisentris dianggap sebagai bentuk pengaturan kelembagaan yang mampu meningkatkan kesesuaian antara pengetahuan, tindakan, dan proses sosial ekologis dalam mencapai efektivitas adaptasi masyarakat ditingkat yang sesuai. Singkatnya, tata kelola multilevel dan polisentris ini mencoba untuk mengintegrasikan skala tata kelola yang vertikal (nasional, daerah, desa, masyarakat) dengan keberagaman institusi dan juga aktor lokal⁵⁵.

Disamping itu, penelitian yang dilakukan Simone Ruane mengenai *Applying the principles of adaptive governance to bushfire management: a case study from the South West of Australia* menuturkan bahwa tata kelola adaptif menekankan peran institusi polisentris di mana otoritas pengambilan keputusan dilakukan antar banyak jaringan aktor dan didistribusikan pada berbagai skala kelembagaan. Ostrom dalam menekankan bahwa polisentrisisme menumbuhkan pembelajaran lintas institusi, kepercayaan, dan komunikasi sehingga nantinya akan memunculkan keberagaman sumber daya dalam memfasilitasi kebijakan dan penyelesaian masalah kolektif⁵⁶. Sistem polisentrik juga melibatkan

⁵² Carlisle and Gruby. 2017. "Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons." The Policy Studies Journal. Hlm 2.

⁵³ Djalante, Holley, and Thomalla. 2011. *Op.Cit.* Hlm 4.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ T. Yasmin, M. Farrelly, and B. C. Rogers. 2020. "Adaptive governance: A Catalyst for Advancing Sustainable Urban Transformation in the Global South," International Journal of Water Resources Development 36, no. 5: hlm 14.

⁵⁶ Ruane. 2020. *Op.Cit.* Hlm 6.

desentralisasi kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada pemerintahan lokal atau badan yang memiliki wawasan tentang konteks permasalahan. Oleh karena itu, sistem polisentris memungkinkan lembaga lokal untuk bertindak secara otonom dan sebagai jaringan yang saling terkait. Disisi lain, sistem polisentris ini oleh dianggap lebih tahan banting dalam menangani dinamika lingkungan sosial ekologis karena tidak bergantung pada kendali pemerintahan pusat⁵⁷.

Marshall menjelaskan bahwa polisentris ini memiliki keterkaitan dengan beberapa keuntungan, diantaranya akses pengetahuan lokal yang lebih baik, pengintegrasian kebijakan yang lebih dekat dengan konteks, meminimalisasi kegagalan sumber daya pada proses-proses kebijakan, transmisi informasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas dalam tata kelola adaptif⁵⁸. Namun, dalam pengambilan keputusan sering terjadi tumpang tindih dengan tingkat otonomi dikarenakan pada tata kelola polisentrik tidak membatasi diri pada badan pemerintahan formal, sehingga diasumsikan bahwa publik, swasta, dan sektor sukarela memiliki tanggung jawab dan peran pendukung penting dalam pemerintahan polisentris. Carlisle dkk kemudian menjelaskan bahwa tumpang tindih memungkinkan pengambilan keputusan menjadi lebih baik dalam mengatasi tantangan dan tujuan yang muncul tanpa adanya arah dan mampu mendorong pengorganisasian diri yang lebih menguntungkan karena akses informasi yang lebih mudah satu sama lain⁵⁹.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa institusi polisentris dan berlapis-lapis atau polisentrisitas merupakan bentuk pemerintah memiliki banyak pusat pengambilan keputusan dengan melibatkan para stakeholder pada tingkatan yang berbeda baik vertikal maupun horizontal untuk berkolaborasi sehingga mampu menciptakan sebuah solusi kolektif untuk adaptasi sebuah institusi.

1.5.2.1.2 *Participation and Collaboration* (Partisipasi dan Kolaborasi)

Partisipasi memiliki banyak definisi tergantung pada fitur mana proses partisipasi tersebut dibahas. Misalnya, partisipasi masyarakat diartikan sebagai kemampuan dari suatu masyarakat untuk turut serta mengaktualisasikan diri untuk berkontribusi dalam sebuah program atau kebijakan⁶⁰. Partisipasi akan mendorong sebuah efektivitas dalam pelaksanaan suatu pembangunan. Partisipasi akan mendorong adanya sebuah kolaborasi, karena dengan berpartisipasi maka hubungan kolaboratif akan tercipta antar stakeholder. Djalante mencoba

⁵⁷ Carlisle and Gruby. 2017. *Op.Cit.* Hlm 10.

⁵⁸ *Ibid.* hlm 5

⁵⁹ *Ibid.* hlm 9.

⁶⁰ Ira and Muhamad. 2020. *Op Cit.* Hlm 126.

mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu proses yang melibatkan pelbagai pemangku kepentingan, termasuk aktor pemerintah dan aktor non pemerintah dan masyarakat untuk mengumpulkan berbagai pandangan serta sumber daya masing-masing untuk memecahkan sebuah problem yang menjadi perhatian publik⁶¹. Kolaborasi penting dilakukan utamanya dalam menanggapi kompleksitas permasalahan publik dikarenakan kolaborasi menciptakan sebuah penyatuan pengetahuan dan sumber daya yang memungkinkan proses adaptifitas menjadi efektif dan berhasil⁶². Kolaborasi oleh Ansel and Gash didefinisikan sebagai sebuah proses di mana terjadi hubungan multilateral antara berbagai aktor yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan publik⁶³. Seperti yang dijelaskan oleh Ansell and Gash bahwa kolaborasi pemerintah harus memuat beberapa kriteria yakni forum musyawarah formal yang diinisiasi oleh lembaga otoritas publik, yang didalamnya memuat partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan suatu keputusan kolektif yang berorientasi pada konsensus dalam menyelesaikan permasalahan publik beserta manajemennya⁶⁴.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi dan kolaborasi. Seperti yang dijelaskan oleh Djalante bahwa pengalaman dan kualitas kepemimpinan, efisiensi biaya, kesetiaan kelompok, pengalaman kolektif dari kolaborasi, dan pengaruh lingkungan eksternal yang mempengaruhi upaya kolaboratif⁶⁵. Kepemimpinan memegang peran penting didalam *adaptive governance* sebuah institusi dalam mengelola perubahan. Seperti yang dijelaskan oleh Folke bahwa kepemimpinan memegang peran penting dalam membentuk perubahan dan reorganisasi sebuah institusi dengan memberikan inovasi guna mencapai fleksibilitas dalam menangani dinamika ekosistem⁶⁶. Terdapat beberapa fungsi kunci kepemimpinan untuk pemerintahan adaptif diantaranya membangun sebuah kepercayaan, mengelola konflik, menjadi penghubung antara aktor yang terlibat, membangun kemitraan, mengumpulkan dan menghasilkan pengetahuan untuk merancang kebijakan, serta memobilisasi dukungan untuk mencapai efektifitas dalam melaksanakan perubahan. Selain kepemimpinan, modal sosial juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi dan kolaborasi dalam tata kelola adaptif. Modal sosial dapat meningkatkan fleksibilitas organisasi dan manajemen institusi karena pengelolaan ekosistem membutuhkan masyarakat sipil dengan tingkat modal sosial tertentu⁶⁷.

⁶¹ Djalante, Holley, and Thomalla. 2011. *Op Cit.* hlm 6.

⁶² *Ibid.* hlm 5

⁶³ Chris Ansell and Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4. hlm 5-6.

⁶⁴ *Ibid.* hlm 2-3

⁶⁵ Djalante, Holley, and Thomalla, 2011. *Op.Cit.* hlm 5.

⁶⁶ Folke et al., 2005. *Op.Cit.* hlm 451

⁶⁷ *Ibid.* hlm 452

Kolaborasi dan partisipasi bukan hanya sekedar mengumpulkan para aktor secara bersama, namun juga bagaimana menciptakan partisipasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan sebuah pemerintahan yang kuat untuk mendorong keberlanjutan partisipasi dan kolaborasi, termasuk pendanaan dalam suatu program⁶⁸. Hal tersebut merupakan suatu dukungan yang harus dilakukan pemerintah guna memastikan bahwa terdapat kesempatan bagi para aktor yang termarginalisasi untuk ikut menyuarakan diri dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa partisipasi dan kolaborasi merujuk pada kontribusi aktif para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan sebuah masalah melalui upaya kolektif yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, mengacu pada bagaimana adaptasi pengelolaan pariwisata Desa Pujon Kidul dalam melibatkan para stakeholder secara berkelanjutan atas perubahan yang berdampak pada pariwisata Desa Pujon Kidul.

I.5.2.1.3 Self Organization and Network (Pengorganisasian Diri dan Jaringan)

Sejalan dengan kolaborasi, maka diperlukan jaringan dalam tata kelola adaptif. Jaringan merupakan merupakan sebuah sistem di mana terdapat beragam aktor lintas tingkat organisasi disatukan untuk berfokus pada masalah tertentu⁶⁹. Contoh nyata dalam jaringan yakni misalnya jaringan akademik, penelitian dan ilmiah, serta sektor swasta⁷⁰. Folke berpendapat bahwa jaringan mewakili sebuah sistem pemerintahan informal di seluruh tingkat organisasi dengan minat untuk mempengaruhi dan mengelola sistem yang membingkai pengaturan diri. Selanjutnya, jaringan sosial informal di dalam perubahan yang cepat mampu menyediakan arena untuk kebaruan dan inovasi karena bersifat fleksibel daripada tertahan di birokrasi⁷¹. Sementara menurut Djalante et. Al, jaringan sendiri dapat diaktualisasikan melalui *boundary organization* atau organisasi batas, *bridging organizations* atau organisasi penghubung, dan *epistemic communities* atau komunitas epistemic.

Organisasi batas merupakan wadah bagi para ilmuwan dan pembuat keputusan untuk bertemu dan berdiskusi guna menciptakan arena batas yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat⁷². Sedangkan organisasi penghubung memiliki cakupan yang lebih luas dari organisasi batas, misalnya LSM yang membangun arena

⁶⁸ Simone Ruane. 2020. *Op Cit.* hlm 7.

⁶⁹ Djalante, Holley, and Thomalla, 2011. *Op Cit.* hlm 7

⁷⁰ Munene, Swartling, and Thomalla. 2018. *Op.Cit.* hlm 4.

⁷¹ Folke et al., 2005. *Op.Cit.* hlm 450.

⁷² Djalante, Holley, and Thomalla. 2011. *Loc.Cit.*

sosial. Dibandingkan organisasi batas, organisasi penghubung memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Folke menjelaskan organisasi penghubung merupakan penggerak eksternal yang memberikan peluang untuk mendatangkan sumber daya, pengetahuan, dan insentif lainnya untuk pengelolaan ekosistem⁷³. Selanjutnya, komunitas epistemik dianggap sebagai sebuah sistem tata kelola yang terdiri dari beberapa pihak dengan level yang berbeda yang kemudian dibentuk atas dasar minat yang sama guna mempengaruhi pengimplementasian kebijakan. Pengorganisasian diri juga dapat dilihat sebagai arena transisi, yang masuk dalam masalah dan membuat kemungkinan solusi yang secara sengaja dibuat untuk kemudian diintegrasikan guna menghasilkan agenda inovatif dan visioner. Organisasi-organisasi tersebut perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan adaptivitas sebuah kebijakan dikarenakan terdapat proses *transfer of knowledge* atau transfer pengetahuan dari berbagai organisasi sehingga mendorong terciptanya sebuah pembelajaran sosial.

Pengorganisasian diri dan jaringan membutuhkan fleksibilitas dalam operasionalisasi kebijakan. Dalam kajiannya, Djalante menyerukan bahwa fleksibilitas dibutuhkan dalam konteks kemampuan untuk mempercepat penyebaran sumber daya dengan lebih sederhana tanpa harus melewati kerumitan birokrasi seperti yang terdapat dalam pemerintahan formal. Hal ini membuat peran komunitas menjadi penting untuk mendukung tahap-tahap dalam pemulihan pasca bencana. Peran kelompok alternatif juga diakui dalam sistem tata kelola yang menangani dinamika lingkungan global dan resiko. Sebagian besar pemerintah lokal di seluruh dunia berperan aktif terhadap jaringan inovatif guna mendorong pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh. Jaringan inovatif membutuhkan forum multi stakeholder sebagai sebuah strategi pemerintah nasional untuk meningkatkan legitimasi serta mengelola konflik tanpa devolusi kekuasaan⁷⁴. Sehingga, organisasi-organisasi tersebut perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan adaptivitas sebuah kebijakan dikarenakan terdapat proses *transfer of knowledge* atau transfer pengetahuan dari berbagai organisasi sehingga mendorong terciptanya sebuah pembelajaran sosial.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian diri dan jaringan mengacu pada sistem tata kelola yang melibatkan banyak aktor baik formal maupun informal yang bersifat fleksibel yang dapat mempercepat terjadinya *transfer of knowledge* guna mendorong terciptanya sebuah pembelajaran dan inovasi dalam sebuah adaptivitas.

⁷³ Folke et al.,. 2005. *Op.Cit.* Hlm. 461.

⁷⁴ Djalante, Holley, and Thomalla, 2011. *Loc .Cit.*

I.5.2.1.4 *Learning and Innovation* (Pembelajaran dan Inovasi).

Pembelajaran muncul dari adanya kerjasama antara institusi lokal yang terjadi dalam dinamika lingkungan sosial-ekologis. Telah dijelaskan oleh Djalante bahwa sistem polisentris memberikan kesempatan bagi institusi lokal dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan kepercayaan dan mencapai efektivitas keputusan yang adil dan keberlanjutan⁷⁵. Kolaborasi memberikan peluang untuk institusi lokal untuk belajar dan berinovasi dengan memanfaatkan sumber-sumber pengetahuan yang beragam untuk membuat strategi adaptasi yang lebih baik kedepannya. Folke juga menekankan bahwa pembelajaran merupakan suatu hal yang diperlukan karena akan membantu organisasi dalam mengembangkan keahlian yang adaptif dalam mengelola sebuah organisasi⁷⁶. Djalante menjelaskan bahwa kunci utama untuk mencapai pembelajaran berkelanjutan yakni dengan pembelajaran publik atau sosial. Pembelajaran sosial dianggap sebagai prinsip sentral dalam literature pemerintahan adaptif karena mengacu pada pembelajaran yang timbul dari adanya hubungan timbal balik atau jaringan⁷⁷. Pembelajaran sosial muncul melalui adanya memori sosial. Memori sosial adalah arena dimana pengalaman berhasil diperoleh dari adanya perubahan yang kemudian diaktualisasikan dalam proses pengambilan keputusan guna memperoleh strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan⁷⁸.

Pembelajaran juga diasumsikan mampu untuk menciptakan suatu kebaruan atau inovasi. Seperti yang dijelaskan oleh Djalante dalam tata kelola adaptif pembelajaran akan membentuk suatu arena yang memungkinkan untuk mendorong inovasi atau kebaruan. Folke menekankan bahwa pembelajaran yang efektif atas pengalaman merupakan hal penting bagi sebuah organisasi guna membangun pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan tata kelola adaptif yang baik⁷⁹. Pembelajaran nantinya akan berkontribusi pada keberagaman informasi atau mutual informasi antara dua atau lebih organisasi yang mendorong organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang mengandung kebaruan sehingga dapat mendorong sebuah inovasi bagi organisasi untuk mengatasi permasalahan sosial ekologis. Kerangka Sendai Framework menganggap pembelajaran sosial sebagai prioritas kebijakan. Pembelajaran sosial sendiri dapat memunculkan peluang untuk beradaptasi dengan mengambil pelajaran

⁷⁵ Djalante, Holley, and Thomalla, 2011. *Loc.Cit.*

⁷⁶ Folke et al.,2005. *Op.Cit.* Hlm 447.

⁷⁷ Ruane, 2020. *Loc.Cit*

⁷⁸ Djalante, Holley, and Thomalla, 2011. *Op Cit.* Hlm 453

⁷⁹ Folke et. Al. hlm 452.

diluar level individu yang memungkinkan terbentuknya pengetahuan-pengetahuan baru secara kolektif sehingga menghasilkan perubahan pada praktik yang dilakukan⁸⁰.

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa pembelajaran dan inovasi adalah hal penting dalam tata kelola adaptif. Pembelajaran sosial merupakan kemampuan untuk *knowledge*, pertukaran ide, dan pengalaman antara organisasi satu dengan yang lainnya untuk mengembangkan dan mempelajari situasi tertentu guna menghadapi dan mengurangi resiko bencana sehingga pengambil keputusan dapat secara komprehensif memahami masalah dan mampu menciptakan kebaruan dari apa yang telah diterapkan sebelumnya.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik. Istilah kebijakan publik banyak ditemukan dalam berbagai kajian literatur. Konsep kebijakan publik yang secara sederhana diungkapkan oleh Thomas Dye bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah atau bahkan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah⁸¹. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa ketika pemerintah memilih untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan publik maka bisa disebut dengan kebijakan publik. Definisi sederhana lainnya juga dikemukakan oleh Eyestone bahwa kebijakan publik berkaitan dengan hubungan unit pemerintah dengan lingkungan miliknya. Kebijakan publik juga didefinisikan sebagai tindakan, tujuan, pernyataan dari pemerintah mengenai hal tertentu yang berisi langkah-langkah untuk diimplementasikan dan penjelasan mengenai mengapa mereka melakukan hal tersebut⁸². Sejalan dengan definisi sebelumnya, bahwa kebijakan publik diartikan sebagai suatu sistem yang saling terkait yang merupakan keputusan dari para aktor politik tentang penentuan tujuan dan sarana pencapaian putusan untuk menangani situasi tertentu. Kebijakan publik selalu berkaitan dengan keterlibatan berbagai aktor politik untuk menyelesaikan permasalahan publik. Hal tersebut berkaitan dengan definisi kebijakan dari James Anderson yang menganggap kebijakan publik sebagai suatu kursus yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sekumpulan aktor dalam menangani suatu masalah sosial yang menjadi perhatian publik.

Kebijakan publik memiliki orientasi pada tujuan. Seperti yang tulis oleh Kevin bahwa kebijakan publik dilaksanakan tidak secara acak namun memiliki sasaran serta tujuan yakni

⁸⁰ Munene, Swartling, and Thomalla, 2018. *Loc.Cit*

⁸¹ Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, 1st ed. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003). Hlm 3.

⁸² Evan J. Ringquist. 2011. *The Public Policy Theory Primer, Perspectives on Politics*, vol. 9. Hlm 3-4.

menciptakan kesejahteraan masyarakat⁸³. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan produk atas permintaan sekaligus tindakan yang diarahkan oleh pemerintah untuk merespon tekanan atas beberapa masalah yang menjadi perhatian dan dibuat oleh otoritas publik. Permasalahan publik memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari penyelesaian konflik atas kelangkaan sumber daya, mendorong partisipasi masyarakat, melindungi hak rakyat, termasuk pengelolaan pariwisata yang terdampak pandemi Covid 19.

Secara lebih jelas, Lasswell menyiratkan beberapa karakteristik kebijakan publik, diantaranya⁸⁴:

- A) Berorientasi terhadap masalah. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Berorientasi pada masalah merupakan hal terpenting dalam pembuatan kebijakan publik. Laswell sendiri menjelaskan bahwa ilmu kebijakan tidak berfokus pada analisis, proses, atau evaluasi namun bagaimana memetakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.
- B) Multidisiplin. Multidisiplin menginterpretasikan bahwa dalam kebijakan publik tidak hanya berpaku pada satu disiplin ilmu pengetahuan. Kompleksitas permasalahan publik membuat permasalahan publik membutuhkan banyak disiplin ilmu untuk menanggulangi kompleksitas permasalahan publik yang terjadi
- C) Berorientasi pada nilai. Secara khusus, Lasswell menjelaskan bahwa ilmu kebijakan publik berorientasi pada nilai di mana tujuan akhir dari kebijakan publik adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai demokrasi. Laswell juga menjelaskan bahwa penekanan khusus dalam kebijakan publik adalah demokrasi yang berusaha mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam teori dan fakta.

Penjelasan diatas memberikan makna yang lebih luas mengenai kebijakan publik yakni kebijakan publik pada hakikatnya diorientasikan untuk menyelesaikan permasalahan publik dengan berbagai upaya dan langkah serta strategi yang dilakukan dengan multidisiplin ilmu dan memiliki tujuan akhir untuk memaksimalkan nilai-nilai demokrasi guna mewujudkan harkat dan martabat manusia.

I.5.3.1 Siklus Kebijakan Publik

Terdapat beberapa kegiatan pokok yang menjadi siklus sistematis dari kebijakan publik. Salah satunya yakni siklus kebijakan yang diperkenalkan oleh Riant Nugroho dalam

⁸³ *Ibid.* hlm 107.

⁸⁴ *Ibid.* hlm 9.

bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi”. Riant Nugroho menjelaskan bahwa terdapat 3 pokok kegiatan yang berkenaan dengan kebijakan publik⁸⁵, diantaranya:

- 1) Formulasi atau perumusan kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan tahap dalam merumuskan alternative-alternatif dari kebijakan yang akan dilangsungkan. Hal ini didasari atas diskusi dalam memilih dan menempatkan masalah publik yang sedang terjadi. Dalam formulasi kebijakan juga terdapat beberapa agenda politik di mana hal tersebut terjadi karena dalam formulasi kebijakan terdapat kegiatan negosiasi, kooperasi, koalisi, dan kompromi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwakilkan oleh legislative, diantaranya partai politik, organisasi masyarakat, dll.
- 2) Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilakukan sesuai dengan arahan. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan dianggap sebagai tindakan individu, negara, atau swasta untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah dicanangkan. Implementasi kebijakan juga dikaitkan dengan bagaimana menghubungkan realisasi dan tujuan kebijakan dengan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah⁸⁶. Disisi lain, implementasi kebijakan merupakan sebuah proses bagaimana mentransformasi input yang berupa tujuan dan isi yang akan dioperasionalisasikan melalui serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan harapan atau hasil yang diimpikan dalam suatu kebijakan yakni *output* dan *outcomes*. Riant Nugroho juga menekankan bahwa pada hakikatnya, kebijakan publik merupakan intervensi dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik, dan implementasi kebijakan merupakan wujud dari tindakan intervensi itu sendiri. Sehingga implementasi kebijakan bisa dikatakan sebagai cara atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan publik dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
- 3) Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan tahap melakukan pemantauan atau penilaian terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik mencapai harapan dengan membandingkan dengan kenyataan dari implementasi kebijakan publik. William N Dunn menyamakan istilah evaluasi dengan kegiatan menafsirkan, memberi angka, dan menilai kebijakan

⁸⁵ Nugroho, 2003. *Op. Cit. hlm* 74.

⁸⁶ Haedar Akib, 2010. “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagaimana,” *Jurnal Adminstrasi Publik* 1, no. 1 (2010). <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>. hlm 3.

publik⁸⁷. Riant Nugroho mengasumsikan bahwa kegiatan evaluasi akan memberikan beberapa informasi yang *real* dan valid atas kinerja dari suatu kebijakan sehingga dapat berkontribusi untuk mengkritik dan memberikan masukan pada kebijakan yang selanjutnya. Evaluasi dianggap bukan sebagai tahap untuk memberikan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan namun memberikan pengetahuan mengenai seberapa besar *gap implementation* sehingga dapat ditemukan kekurangan dan kelebihan dalam suatu kebijakan.

I.5.4 Kebijakan Pariwisata

Kebijakan pariwisata merupakan kebijakan publik dalam penanganan permasalahan pariwisata. Pada awalnya kebijakan pariwisata ini diupayakan oleh Dredge dan Jenkins (2011) untuk menjadi bagian dalam diskusi bidang kebijakan publik mengingat bahwa bidang pariwisata memerlukan pembenahan namun hanya mendapatkan sedikit perhatian dalam akademisi kebijakan publik⁸⁸. Maria Velasco dalam tulisan yang berjudul *Tourism Policy* menjelaskan bahwa konsep sentral dalam kebijakan pariwisata yakni adalah perencanaan atau presepsi untuk mewujudkan tata kelola ruang atau promosi pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang belum terjamah untuk meningkatkan strategi pariwisata yang berkelanjutan⁸⁹. Kebijakan pariwisata juga diartikan sebagai kumpulan wacana, keputusan, maupun praktik pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan yang berkaitan dengan pariwisata baik bekerjasama dengan swasta maupun masyarakat sipil. Definisi lain mengenai kebijakan pariwisata dapat dilihat dari Buku *Tourism: Principles, Practices, Philosophies* yang dikutip oleh Riant Nugroho bahwa kebijakan pariwisata merupakan strategi, peraturan, pedoman, tujuan, dan arahan pengembangan pariwisata guna menyediakan rencana kerja dalam pengembangan pariwisata yang akan dipengaruhi secara langsung oleh keputusan kolektif dan individu dalam jangka panjang⁹⁰. Selanjutnya juga terdapat definisi dari Edgell dkk bahwa kebijakan pariwisata merupakan sebuah tindakan yang progresif dari pedoman, prinsip, dan arahan yang telah diatur secara etis yang didalamnya terdapat kegiatan perencanaan,

⁸⁷ William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press , <http://journal.unhena.ac.id/index.php/HibSos/article/view/99/81>. hlm 608.

⁸⁸ João Manuel Lemos Baptista, Margarida Pocinho, and Florin Nechita, 2019. "Tourism and Public Policy," Series V - Economic Sciences 12(61), no. 1 (2019). hlm 78.

⁸⁹ Maria Velasco. 2020. "Tourism Policy," *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, no. July (2020). Hlm 2.

⁹⁰ Riant Nugroho, 2018. *Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar). Hlm 56.

pengembangan, produk, layanan, pemasaran, serta keberlanjutan guna pertumbuhan pariwisata di masa depan⁹¹.

Kebijakan pariwisata dimaknai berbeda oleh Lemos Baptista dkk dalam dengan tindakan yang dilakukan pemerintah dengan adanya unsur kesengajaan yang melampaui refleksi teoritis dan politik menjadi tindakan nyata yang memanfaatkan sumber daya dengan merangkul banyak aktor untuk mencapai efektivitas dari pengelolaan pariwisata⁹². Meskipun pemerintah menjadi *leading sector*, namun peran swasta, masyarakat, bahkan akademisi memiliki peran penting untuk mewujudkan kebijakan pariwisata yang komprehensif dalam segala sisi, baik dalam *output* maupun *outcome*. Seperti yang diungkapkan Lemos dkk bahwa pemerintah memiliki peran yang sah dalam memastikan standar kompetensi pariwisata tertentu dalam pasar. Lemos Baptista dkk juga mengartikan mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai sebuah pedoman atau strategi dan tujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata publik⁹³. Beberapa tindakan pemerintah sebagai wujud keterlibatannya pada industri pariwisata yakni kebijakan, perencanaan, pengembangan, dan pengaturan. Pengelolaan pariwisata akan menjadi penyebab dalam kemunduran pariwisata jika tidak direncanakan dengan penuh pertimbangan. Maka dari itu kebijakan pariwisata berperan penting sebagai pedoman dalam melangsungkan pengelolaan kepariwisataan yang merupakan hasil dari perencanaan yang detail, termasuk didalamnya rencana program dan proyek pariwisata.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kebijakan, tindakan, pedoman, dan prinsip yang telah dirancang secara etis dimana didalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pengembangan, pemasaran, dan keberlanjutan pariwisata di masa mendatang dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan merangkul banyak aktor pemangku kepentingan guna mencapai efektivitas pengelolaan pariwisata.

I.5.4.1 Jenis Kebijakan Pariwisata

Sebagaimana penjelasan mengenai kebijakan publik secara umum, maka menurut Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul “*Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang*” kebijakan pariwisata dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni kebijakan pariwisata untuk pembangunan umum dan pelayanan publik. Kebijakan pariwisata dalam pembangunan umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

⁹¹ *Ibid.* hlm 7.

⁹² Lemos Baptista, Pocinho, and Nechita, 2019. “*Tourism and Public Policy.*”. hlm 81

⁹³ *Ibid.* hlm 80.

A. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik

Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang mengarah pada pembangunan infrastruktur dan superstruktur untuk pembangunan destinasi pariwisata. Adapun beberapa hal yang tergolong dalam pembangunan fisik yakni:

- 1) Atraksi. Atraksi merupakan sebuah bentuk hal yang bisa ditonton dan dinikmati oleh wisatawan. Beberapa hal yang tergolong dalam atraksi adalah perbaikan maupun pembangunan suatu destinasi wisata seperti pantai, hutan, pegunungan, dll.
- 2) Akses. Akses merupakan sarana prasarana yang digunakan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata dalam hal ini yakni jalan raya, jalan desa, dan alat transportasi, dll.
- 3) Amenitas. Amenitas merupakan sebuah fasilitas yang mendukung keberlangsungan dari pariwisata yang berada diluar akomodasi, misalnya toilet, hotel, restoran, tempat ibadah, dll.

Sedangkan pembangunan non fisik lebih mengarah pada pembangunan yang berkaitan dengan manusia dan lembaga. Adapun beberapa hal yang tergolong dalam pembangunan non fisik yakni:

1) Pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung efektivitas pencapaian tujuan suatu organisasi/lembaga. Dalam hal ini, pembangunan manusia dimaksudkan pada pemberian pelatihan, pendidikan, sertifikasi, maupun pendampingan baik pada individu, kelompok/komunitas, maupun organisasi dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

2) Pembangunan lembaga di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Adapun pembangunan lembaga dikelompokkan menjadi 3, diantaranya:

- a) Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi mencakup lembaga yang menjalankan suatu usaha formal dan informal maupun modern dan tradisional, seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima (PKL), warung, dll.
- b) Lembaga politik. Lembaga politik mencakup lembaga yang berkaitan dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, seperti kelompok kepentingan yang memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan politik dalam pelaksanaan pariwisata.

- c) Lembaga sosial budaya. Lembaga sosial budaya mencakup lembaga yang bergerak dibidang kebudayaan seperti seniman, kelompok religi, hingga pekerja budaya

Selanjutnya, menurut Baptista kebijakan pariwisata menyangkut beberapa hal, diantaranya⁹⁴ :

- 1) pembentukan regulasi atau undang-undang khusus dalam pariwisata;
- 2) pengaturan mengenai akses dana, serta dukungan dalam pelaksanaan program;
- 3) penataan pariwisata dan sarana prasarana seperti akses pariwisata, dll;
- 4) perencanaan dan pengelolaan kegiatan pariwisata; dan,
- 5) promosi pariwisata dan memasarkan destinasi. Sehingga pengelolaan pariwisata menjadi bagian dari kebijakan pariwisata.

I.6 Definisi Konsep

I.6.1 Governance

Sebuah paradigma mengenai organisasi publik yang tanggap dan aktif dalam menyelesaikan permasalahan publik yang sifatnya kompleks dengan mengikutsertakan aktor non pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

I.6.2 Adaptive Governance atau Tata Kelola Adaptif

Pendekatan yang berkaitan dengan responsivitas pemerintah untuk menanggapi perubahan dan ketidakpastian lingkungan sosial dan ekologi dengan memiliki beberapa indikasi seperti institusi polisentris dan berlapis-lapis, partisipasi dan kolaborasi, pengorganisasian diri dan jaringan, dan inovasi serta pembelajaran.

I.6.3 Institusi Polisentris dan Berlapis-lapis

Bentuk pemerintah memiliki banyak pusat pengambilan keputusan dengan melibatkan para stakeholder pada tingkatan yang berbeda sehingga mampu menciptakan sebuah solusi kolektif untuk adaptasi sebuah institusi.

I.6.4 Partisipasi

Bentuk kontribusi aktif para pemangku kepentingan baik aktor *government* maupun aktor *non-government* sebagai bentuk aktualisasi diri dalam sebuah program atau kebijakan.

⁹⁴ *Ibid.*

I.6.5 Kolaborasi

Bentuk keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktor pemerintah dan aktor non pemerintah dan masyarakat guna mengumpulkan sumber daya dan gagasan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan publik secara kolektif.

I.6.6 Pengorganisasian Diri dan Jaringan

Pengorganisasian diri dan jaringan mengacu pada keterlibatan multi-stakeholder yang bersifat fleksibel dengan tujuan untuk mempercepat terjadinya *transfer of knowledge* guna mendorong terciptanya sebuah pembelajaran dan inovasi dalam sebuah adaptivitas.

I.6.7 Pembelajaran

Pembelajaran merupakan kemampuan untuk memahami dan mempelajari sebuah permasalahan yang terjadi dari adanya *transfer of knowledge*, pertukaran ide, dan pengalaman antara organisasi satu dengan yang lainnya untuk mengembangkan dan merubah sebuah praktik guna menghadapi dan mengurangi resiko bencana.

1.6.8 Inovasi

Sebuah bentuk kebaruan atau praktik baru yang muncul dari adanya pembelajaran atas perubahan yang terjadi akibat adanya perubahan lingkungan social ekologis.

I.6.9 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan yang menjadi perhatian publik, bersifat multidimensi, dan multi disiplin untuk menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.

I.6.10 Kebijakan Pariwisata

Kebijakan pariwisata merupakan kebijakan, tindakan, maupun praktik yang dilakukan oleh organisasi pengelola pariwisata yang mengandung unsur kesengajaan untuk mengembangkan dan mengelola pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan merangkul banyak aktor pemangku kepentingan guna mencapai efektivitas pengelolaan pariwisata.

I.7 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam banyak disiplin ilmu merujuk pada istilah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan data. Metodologi juga dijadikan sebagai landasan filosofis dalam penelitian dengan maksud untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang baru sedangkan metode adalah alat dan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang

ada Sedangkan metodologi penelitian menurut dimaknai sebagai pemahaman mengenai seluruh proses penelitian. Sedangkan metode penelitian lebih mengacu pada rangkaian teknik tertentu yang digunakan untuk memilih kasus, mengamati serta mengukur fenomena sosial, mengolah data, menganalisis, serta membuat laporan hasil⁹⁵. Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi penelitian. Neuman menjelaskan bahwa dalam metodologi penelitian sosial terdapat 3 pendekatan yang mana mereka memberikan cara yang berbeda untuk mengamati, memahami, dan mengukur realita sosial⁹⁶. Ketiga pendekatan tersebut yakni *positivist social science* (pendekatan positivistik), *interpretative social science* (pendekatan interpretative), dan *critical social science* (pendekatan kritis). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan interpretative atau *interpretative social science* dengan metode penelitian kualitatif.

Pendekatan *interpretative social science* merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk menemukan makna yang lebih dalam dan lebih kaya terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan interpretative ini juga menuntut peneliti melakukan kontak pribadi atau berinteraksi secara *intens* dengan orang atau kelompok yang akan mereka teliti. Bahkan bisa dikatakan bahwa seorang peneliti interpretative ini membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pendekatan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai keseharian dari subjek penelitian mereka. Lawrence Neuman juga menambahkan bahwa terdapat penekanan dalam pendekatan interpretative ini yakni tindakan sosial yang bermakna, makna sosial yang dibangun, dan nilai relativisme⁹⁷.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana penelitian ini bukan untuk menguji suatu teori namun lebih kepada mencari penjabaran atau mendeskripsikan peristiwa sosial. Metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan sosial oleh individu atau sekelompok orang. John Creswell juga menyatakan bahwa metode kualitatif ini melibatkan beberapa upaya penting, yakni pengumpulan data secara spesifik, analisis data menggunakan metode induktif, dan menjabarkan mana dari data yang ditemukan⁹⁸. Metode kualitatif sering digambarkan sebagai metode yang berorientasi pada studi kasus, menyelidiki suatu kasus dengan menggambarkan kompleksitas, dan mengeksplorasi proses dan fenomena sosial yang

⁹⁵ W. Lawrence Neuman. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh Edition). London: Pearson Education Limited. hlm 2.

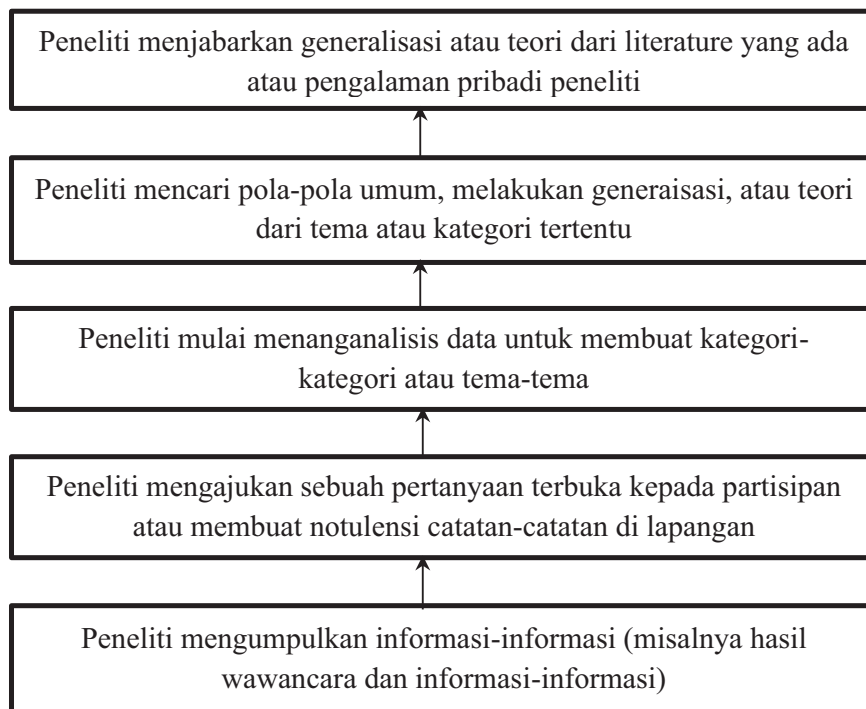
⁹⁶ *Ibid.* hlm 96

⁹⁷ *Ibid.* hlm 103.

⁹⁸ John W. Creswell. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, IV. (Yogyakarta: Pustaka Belajar). Hlm 5.

terjadi⁹⁹. Peran peneliti sendiri dalam metode kualitatif yakni sebagai instrumen kunci yang mana peneliti harus terlibat secara berkelanjutan dengan pihak yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk melakukan pendekatan personal dengan subjek penelitian guna menemukan makna yang mendalam dari informan. Sehingga metode kualitatif bisa dikatakan sebagai metode yang digunakan untuk menjabarkan fenomena dengan lebih kompleks, menggunakan cara pandang induktif, dan fokus pada pemaknaan fenomena sosial.

Cara pandang induktif merupakan cara pandang yang banyak diadopsi dalam metode kualitatif. Craswell menjelaskan bahwa salah satu upaya penting dalam metode penelitian kualitatif yakni adalah analisis data secara induktif yang mana hal tersebut dimulai dari hal yang paling khusus menuju ke hal yang sifatnya umum¹⁰⁰. Neuman dalam menjelaskan bahwa pendekatan induktif itu dimulai dengan mengamati hal yang empiris kemudian direnungkan dan berfikir dengan lebih abstrak¹⁰¹. Lebih jelasnya, Neuman mengatakan bahwa cara berpikir induktif ini dimulai dari topic yang umum dan beberapa gagasan yang tidak jelas yang kemudian diperbaiki dan diuraikan menjadi cara pikir yang lebih abstrak dengan hubungan teoritis. Logika berpikir induktif dalam penelitian kualitatif dapat dilihat dari gambar 4:



⁹⁹ W. Lawrence Neuman. 2014. *Op.Cit.* hlm 2.

¹⁰⁰ John W. Creswell. 2016. *Loc.Cit.*

¹⁰¹ W. Lawrence Neuman. 2014. *Op.Cit.* hlm 70.

Gambar 4. Logika berpikir induktif menurut John W. Creswell¹⁰²

Metode kualitatif tersebut sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan bagaimana tata kelola adaptif yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata di masa pandemi oleh Desa Wisata Pujon Kidul secara kompleks. Selanjutnya metode kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pariwisata di Desa Pujon Kidul dimasa pandemi bisa tetap menjadi sektor utama penunjang PADes 2021 dengan menggunakan perspektif tata kelola adaptif (*adaptive governance*). Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti berharap mampu menemukan dan memperoleh data serta memperdalam wawasan mengenai tata kelola adaptif dalam pengelolaan pariwisata di masa pandemi oleh Desa Wisata Pujon Kidul.

I.7.1 Tipe Penelitian

Sejalan dengan metode penelitian yang digunakan, maka tipe penelitian dalam penelitian ini yakni penelitian dengan tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai suatu situasi, latar sosial, atau suatu hubungan secara detail dan spesifik¹⁰³. Penelitian deskriptif memulai penelitian dengan suatu masalah atau pertanyaan yang kemudian didefinisikan dengan baik dan berusaha untuk mendeskripsikan masalah tersebut dengan akurat. Penelitian tipe deskriptif ini banyak digunakan oleh sebagian besar penelitian sosial yang ditemukan dalam suatu jurnal ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan penelitian lapangan dan analisis isi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena dirasa relevan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, dimana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana tata kelola adaptif yang dilakukan oleh Desa Wisata Pujon Kidul untuk dalam mengelola pariwisata di masa pandemi Covid 19. Selanjutnya penelitian ini berusaha memperoleh informasi secara detail dan kemudian menggambarannya secara deskriptif dan kompleks. Sehingga dalam penelitian ini, tipe deskriptif dirasa cocok karena peneliti tidak berusaha menguji suatu hipotesis namun lebih mengarah pada mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena sosial.

¹⁰² John W. Creswell. 2016. *Op.Cit.* hlm 88

¹⁰³ W. Lawrence Neuman. 2014. *Op.Cit.* hlm 38.

I.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Penentuan lokasi ini dilakukan secara *purposive* yang sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih yakni Desa Wisata Pujon Kidul. Terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian, antara lain :

- a) Desa Wisata Pujon Kidul merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Malang
- b) Desa Wisata Pujon Kidul mendapatkan penghargaan sebagai Desa Wisata Agro Terbaik tahun 2017 dari Kementerian Desa
- c) Desa Wisata Pujon Kidul memperoleh penghargaan pada ajang Sustainable Tourism Award (ISTA) dalam kategori Pemenang Hijau dari Kementerian Pariwisata pada 2018
- d) Desa Wisata Pujon Kidul meraih penghargaan sebagai desa mandiri inspiratif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dalam acara Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021

I.7.3 Teknik Penentuan Informan

Penelitian kualitatif pada umum menggunakan teknik pengambilan informan non-probabilitas karena tidak memerlukan pendekatan yang direncanakan berdasarkan teori matematika. Teknik *purposive* sebagai salah satu jenis teknik pengambilan keputusan yang secara tidak acak atau *non-probability*. Teknik *purposive* sampling banyak digunakan dalam kajian penelitian eksplorasi atau penelitian lapangan. Hal tersebut dilandasi dengan alasan bahwa sampel non random ini memungkinkan peneliti menggunakan berbagai metode guna menemukan semua kemungkinan kasus yang sangat spesifik dan sulit dijangkau dari populasi¹⁰⁴. Teknik *purposive* atau disebut juga *judgmental sampling* dianggap sebagai pengambilan sampel berharga untuk situasi tertentu dan kasus yang dipilih seringkali jarang mewakili seluruh populasi dan dapat memilih kasus unik yang informatif.

Sehingga peneliti dalam penelitian ini menentukan sampel informan dengan menggunakan teknik *purposive* karena dapat digunakan untuk memilih anggota populasi yang sulit dijangkau dan terspesialisasi¹⁰⁵. Sejalan dengan fokus penelitian yakni mengenai tata kelola adaptif dalam pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul di era pandemi, maka terdapat beberapa informan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang

¹⁰⁴ W. Lawrence Neuman. 2014. *Op.Cit.* hlm 274

¹⁰⁵ *Ibid.*

- b) Ibu Heni Fitriyawati, S.Ak selaku staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- c) Bapak Ibadur Rohman selaku Direktur BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul
- d) Bapak Ilham Husein selaku Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Capung Alas Desa Pujon Kidul
- e) Mas Ilham Dwi Prasetyo selaku Kepala Unit Wisata Desa BUMDes Sumber Sejahtera
- f) Mbak Ika Nur Rohmah selaku Direktur Administrasi BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul
- g) Ibu Pay selaku pelaku UMKM di sekitar objek wisata Café Sawah
- h) Ibu Siyanah selaku pekerja di Café Sawah
- i) Mbak Putri Ayu selaku pekerja di Café Sawah
- j) Mbak Fani selaku pengunjung wisata Café Sawah
- k) Ibu Anik selaku pedagang di Desa Pujon Kidul

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah gambaran singkat mengenai teknik atau cara utama dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data yang relevan terkait tata kelola adaptif dalam pengelolaan pariwisata di masa pandemi Covid 19 oleh Desa Wisata Pujon Kidul. Data memegang peran penting dalam penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian kualitatif, data adalah unsur terpenting untuk menggambarkan suatu fenomena sosial.

John W. Creswell menjelaskan bahwa terdapat beberapa prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data ini kemudian dibagi menjadi 4 cara¹⁰⁶, diantaranya :

1. Observasi kualitatif. Observasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data dimana para peneliti turun ke lapangan untuk mengamati apa yang dilakukan oleh partisipan di lokasi penelitian. Observasi atau penelitian lapangan ini melibatkan peneliti untuk terjun ke lapangan guna mengamati dan mencatat secara langsung suasana yang dialami atas aktivitas yang dilakukan oleh individu. Observasi kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung di Desa Wisata Pujon Kidul yang berlokasi di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Observasi juga dilaksanakan dengan mengamati aktivitas dari kegiatan

¹⁰⁶ John W. Creswell, 2016. *Op. Cit.* hlm 254-255.

pariwisata dan objek-objek wisata yang ada di Desa Wisata Pujon Kidul seperti Wisata Café Sawah dan Wisata Kampung Budaya.

2. Wawancara kualitatif. Wawancara merupakan salah satu proses pengumpulan data secara primer yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka (*face to face*) dan via telepon. Dalam wawancara kualitatif dilaksanakan peneliti dengan memberikan pertanyaan yang tidak terstruktur dan sifatnya pertanyaan terbuka sehingga nantinya akan menimbulkan pandangan dan opini dari para partisipan. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan di beberapa tempat diantaranya Kantor Balai Desa Pujon Kidul, Kantor BUMDes Sumber Sejahtera, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Wawancara secara *face to face* dilaksanakan dengan :

- a) Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul
- b) Bapak Ibadur Rohman selaku Direktur Umum BUMDes Sumber Sejahtera
- c) Ibu Heni Fitriyawati, S.Ak selaku staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- d) Mas Ilham Dwi Prasetyo selaku Kepala Unit Wisata Desa BUMDes Sumber Sejahtera
- e) Mbak Ika Nur Rohmah selaku Direktur Administrasi BUMDes Sumber Sejahtera Pujon Kidul
- f) Ibu Pay selaku pelaku UMKM di sekitar objek wisata Café Sawah
- g) Ibu Siyanah selaku pekerja di Café Sawah
- h) Mbak Putri Ayu selaku pekerja di Café Sawah
- i) Mbak Fani selaku pengunjung wisata Café Sawah
- j) Ibu Anik selaku pedagang di Desa Pujon Kidul

Sementara wawancara via telepon dilakukan dengan :

- a) Bapak Ilham Husein selaku Kelompok Sadar Wisata Capung Alas

3. Studi Dokumen. Studi dokumen merupakan studi yang dilaksanakan pada beberapa dokumen tertulis seperti laporan, hasil wawancara, atau notulen rapat, laporan kinerja, artikel berita, dan jurnal. Didalam penelitian ini, studi dokumen dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dokumen tertulis yang diperoleh dari Desa Pujon Kidul, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, diantaranya:

- a) Profil Desa Pujon Kidul 2022
- b) Kabupaten Malang dalam Angka 2022

- c) Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
 - d) Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Tahun 2019
 - e) Laporan Kunjungan Wisatawan Desa Pujon Kidul 2022
 - f) Laporan Kontribusi Pariwisata terhadap PADes Pujon Kidul 2017-2021
4. Materi audio dan visual. Dalam teknik ini, biasanya data yang akan diperoleh yang berbentuk foto, objek seni, video, atau segala jenis bunyi atau suara. Dalam penelitian ini, materi audio dan visual yang digunakan yakni dokumentasi gambar oleh peneliti dan dokumentasi gambar oleh BUMDes Sumber Sejahtera.

I.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Teknik ini banyak digunakan untuk penelitian kualitatif dimana peneliti berusaha melihat suatu hal dengan mengamati perspektif yang lain dan tidak hanya melihat dari satu perspektif. Dalam teknik triangulasi maka diperlukan beberapa perspektif teori untuk merencanakan atau menafsirkan suatu data¹⁰⁷. Triangulasi juga memberikan kemungkinan untuk mengecek kembali validitas dari temuan yang diperoleh dengan cara membandingkan dengan sumber ilmiah atau teori. Dalam penelitian ini, keabsahan data diperoleh dengan melakukan:

- 1) Perbandingan antara hasil wawancara dengan hasil observasi/pengamatan.
Peneliti dalam hal ini berusaha untuk membandingkan mengenai apa yang diamati dalam lokasi penelitian yakni Desa Wisata Pujon Kidul dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan tentang pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Pujon Kidul di masa pandemi.
- 2) Perbandingan antara hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
Peneliti dalam hal ini akan membandingkan hasil wawancara yang dilakukan kepada partisipan dengan dokumen yang dirasa relevan untuk dijadikan bahan perbandingan.
- 3) Perbandingan antara hasil wawancara satu pihak dengan pihak yang lainnya.
Peneliti dalam hal ini akan membandingkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masing-masing informan yang kemudian memahami berbagai sudut pandang informan satu dengan informan lainnya.

¹⁰⁷ W. Lawrence Neuman, 2014. *Op.Cit.* hlm 166.

I.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan makna pada suatu data baik yang berupa gambar atau teks yang mana kemudian data tersebut dipilih dan dipetakan¹⁰⁸. Analisis data juga diartikan sebagai penyimpulan suatu data yang dilakukan melalui pemberian penilaian, menggunakan penalaran, dan memberikan kesimpulan yang berdasarkan bukti¹⁰⁹. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan waktu yang bersamaan dengan pengumpulan data dan penulisan hasil temuan. Creswell menjelaskan bahwa tidak semua informasi bisa diinput dalam hasil penelitian namun peneliti perlu untuk memisahkan data dan berfokus pada sebagian data¹¹⁰.

Menurut Neuman, teknik analisis data dilaksanakan dengan interaktif dan terjadi berkelanjutan secara terus menerus dan melalui beberapa tahapan hingga data telah jenuh. Adapun beberapa aktivitas dalam melakukan analisis data menurut Neuman¹¹¹, diantaranya:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses untuk menghasilkan sebuah rangkuman, memilih dan memilah hal-hal yang dianggap penting, serta minuman variasi jawaban dari pembahasan dan pola data sesuai fokus penelitian. Data yang diperoleh dari proses reduksi ini akan dapat memberikan gambaran bagi peneliti secara lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses dimana informasi yang telah diperoleh disusun dan diklasifikasikan sehingga memudahkan pembaca dalam pemahaman data. Adapun beberapa penyajian data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif yakni uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan sebuah kesimpulan merupakan tahap dimana setelah seluruh data disajikan dan dianalisis kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan atas temuan dan data yang telah diolah sebelumnya.

¹⁰⁸ John W. Creswell. 2016. *Op.Cit.* hlm 260-261.

¹⁰⁹ W. Lawrence Neuman. 2014. *Op.Cit.* hlm 390.

¹¹⁰ John W. Creswell. 2016. *Loc.Cit.*

¹¹¹ W. Lawrence Neuman. 2014. *Op.Cit.* hlm 522.